



# Pengadilan Militer I-04 Palembang



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022**

# Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Palembang, 17 Februari 2023  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

## **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”.**

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersama Kita Bisa”.**

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; dan Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 rata-rata persentase capaian kinerja mencapai **99,53%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	98,6%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%
	<b>Jumlah Persentase Capaian Kinerja</b>	<b>99,53%</b>

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2022 adalah Sebesar 98,55%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100%	104,2%
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	93%	89%	95,7%
c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	87,8%	94,4%
d.	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91%	91,13%	100,1%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				98,55%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100%

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Ringkasan Eksklusif.....	3
Daftar Isi.....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
A. Latar Belakang.....	9
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
1. Kedudukan.....	11
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan .....	12
1. Sarana dan Prasarana .....	12
2. Tenaga Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang .....	17
3. Tugas Pokok.....	19
C. Struktur Organisasi .....	20
1. Susunan Organisasi .....	20
2. Struktur Organisasi .....	24
D. Isu Strategis .....	25
E. Sistematika Penyajian .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	28
1. Visi, Misi dan Motto .....	17
2. Tujuan .....	29
3. Sasaran Strategis .....	30
4. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	26
5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	36
B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022.....	42
C. Penetapan Kinerja Tahun 2022 .....	42
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
1. Pengukuran Capaian Kinerja .....	30
2. Analisa Akuntabilitas Kinerja .....	31
1. Sasaran: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel .....	46
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu .....	46
2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding .....	52

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	58
4. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan .....	64
2. Sasaran: Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.....	73
3. Sasaran : Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.....	78
B. Realisasi Anggaran.....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	45

#### LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Peta Wilayah Hukum
3. Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2022
4. Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat tahun 2022
5. Reviu Indikator Kinerja Utama
6. Reviu Matrik Rencana Strategis 2020-2024
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
8. SK Tim Penyusunan LKJIP
9. Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2022
10. Realisasi Anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI Tahun 2022
11. Undangan, Notulen Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2022
12. Pernyataan telah di Reviu dan Checklist Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022.
13. Dokumentasi Penganugerahan
14. Dokumentasi Kunjungan Mahasiswa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-04 Palembang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

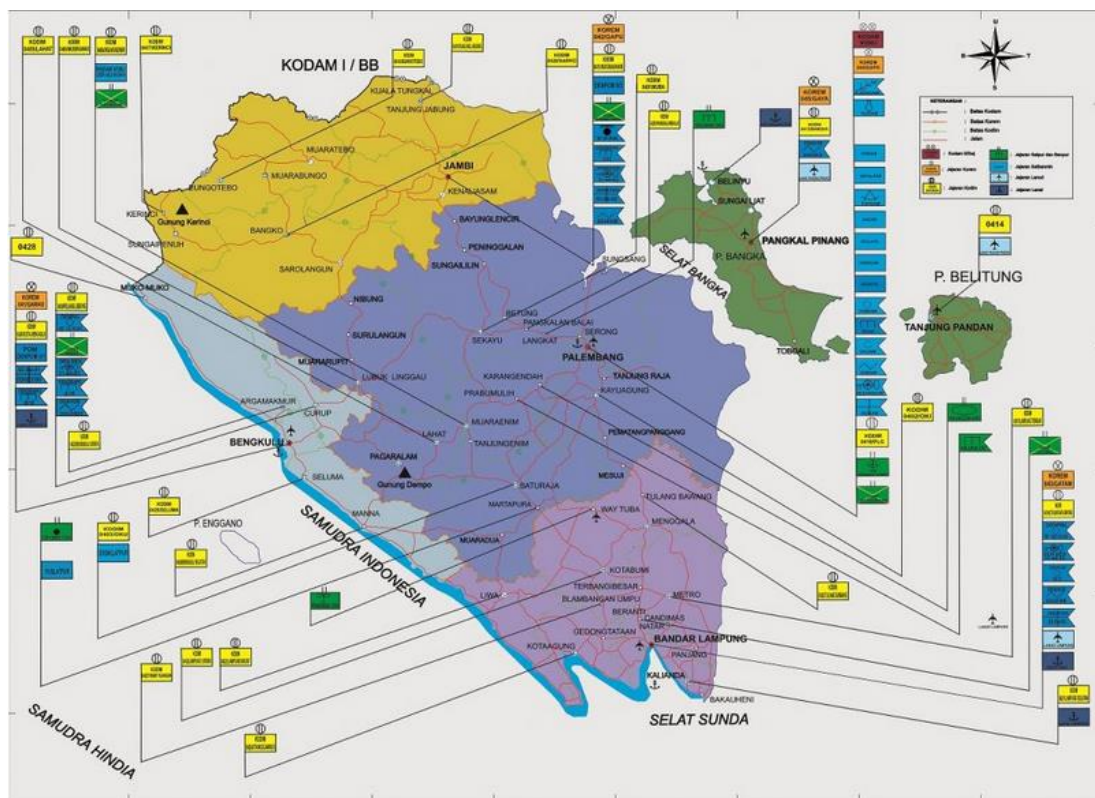
## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga Peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :



## 1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-04 Palembang semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.



Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

## 2. **FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 1. **Sarana dan prasarana.**

Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beralamat di Jl. H. Bastari, Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang, dan untuk mencapai ke gedung ini cukup mudah serta dapat ditempuh dari beberapa arah karena lokasinya terletak di dalam kota Palembang.

Berikut data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer I-04 Palembang :

- a. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 36 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer Palembang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Palembang tanggal 12 April 2013.
- b. Luas tanah : 3.250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- c. Luas bangunan : 1000 M2 (seribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai :
- d. Batas-batas :
  - 1) Utara (depan) : Jl. Utama Perumahan OPI.
  - 2) Timur (kanan) : Gedung BNN Palembang.
  - 3) Barat (kiri) : Gedung Bawaslu Palembang.
  - 4) Selatan (belakang) : Tanah kosong milik Pemprov Sumsel.

#### **Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang**

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
	<b>Lantai 1 (satu)</b>		
1.	Ruang Sidang Utama	1	
2.	Meja PTSP	1	
3.	Ruang Sekretaris	1	
4.	Ruang Umum & Keuangan	1	
5.	Ruang Kepegawaian & Ortalak	1	
6.	Ruang Perencanaan, IT, Pelaporan	1	
7.	Ruang Panel	1	
8.	Ruang Tunggu	1	
9.	Ruang Tahanan Pria	1	
10.	Ruang Tahanan Wanita	1	
11.	Toilet Pria	1	
12.	Toilet Wanita	1	
13.	Ruang Oditur	1	
14.	Ruang Penasihat Hukum	1	
15.	Ruang Perpustakaan	1	
16.	Ruang Klinik	1	

	<b>Lantai 2 (dua)</b>		
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Waka	1	
3.	Ruang Ajudan	1	
4.	Ruang Pokkimmil	1	
5.	Ruang Panitera	1	
6.	Ruang Sidang	1	
7.	Ruang Rapat	1	
8.	Ruang Staf Tera	1	
9.	Toilet Pria	1	
10.	Toilet Wanita	1	
11.	Ruang Arsip Perkara	1	
12.	Ruang IT/Server	1	
	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas</b>		
	<b>Kantor</b>		
1.	Mesin ketik manual standard (14-16) inci	1	Baik
2.	Mesin ketik listrik standard (14-16) inci	1	Baik
3.	Mesin fotocopy folio	2	Baik
4.	Lemari Kayu	11	Baik
5.	Lemari Besi/Metal	7	Baik
6.	Mesin Diesel	1	Baik
7.	Movitex Board	1	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Filing cabinet besi	7	Baik
10.	Brankas	1	Baik
11.	Buffet	3	Baik
12.	Mobile File	2	Baik
13.	Alat penghancur kertas	4	2 Baik 2 Rusak

14.	Mesin absensi	1	Baik
15.	Projector/infocus	1	Baik
16.	Papan Pengumuman	1	Baik
17.	Meja kerja kayu	54	Baik
18.	Kursi besi/metal	158	Baik
19.	Kursi kayu	12	Baik
20.	Meja Resepsionis	1	Baik
21.	Sofa Bed	2	Baik
22.	Partisi	2	Baik
23.	Publik Astari (pembatas Antrian)	4	Baik
24.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
25.	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
26.	Lemari Es	1	Baik
27.	A.c. Split	27	Baik
28.	Ketchen Set	1	Baik
29.	Televisi	4	3 Baik 1 Rusak
30.	Sound System	1	Baik
31.	Unit Power Supplay	5	Baik
32.	Stabilisator	7	Baik
33.	Tiang Bendera	4	Baik
34.	Dispenser	6	Baik
35.	Lambang Instansi	1	Baik
36.	Hendy Cam	1	Baik
37.	Camera Digital	1	Baik
38.	Faxsimile	1	Baik

39.	P.c. Unit	17	Baik
40.	Note Book	18	Baik
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
42.	Scaner	3	Baik
43.	Server	1	Baik
44.	Router	1	Baik
45.	Cat 6 Cable	1	Rusak
46.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Rusak
47.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik
48.	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	Baik
49.	Lisensi	1	Baik
50.	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik
51.	Tanah Kosong	1	Baik
52.	CCTV	1	Baik
53.	Rak Server	1	Baik
54.	Gordyin	114	Baik
55.	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
56.	Mesin Pelubang Kertas	1	Baik
57.	Tabung Pemadam Api	4	Baik
58.	Kursi Roda	1	Baik
59.	Lemari Arsip	2	Baik
60.	ATR	1	Baik
	<b>Penambahan Sarana dan Prasarana</b>		
1.	P.C Unit	5	Baik
2.	LCD Monitor	1	Baik
3.	Loudspeaker	4	Baik
4.	Microphone	7	Baik

5.	Audio Mixing Console	1	Baik
6.	Camera Conference	1	Baik
7.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik
8.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
9.	Printer	2	Baik
10.	Kursi	50	Baik
11.	AC. Spilt	4	Baik
12.	AC Standing	4	Baik
13.	Kursi Tamu	1	Baik

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A.	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					<b>Kondisi</b>
1.	Toyota Kijang Innova E	2008	Baik			45 %
2.	Nissan Grand Livina	2011	Baik			55 %
B.	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda Supra X 125 R	2006	Baik			70 %
2.	Honda Mega Pro CW	2007	Baik			70 %
3.	Honda Mega Pro STD	2008	Baik			70 %
4.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			70 %
5.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			70 %
6.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			70 %
7.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			70 %
8.	Honda GL MAX	2005	Baik			60 %
9.	Honda Tiger CW GL 200 R	2009	Baik			85 %
10.	Honda Mega Pro STD	2009	Baik			85 %

## 2. Tenaga Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang

Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri dari Personil TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Personil TNI sebanyak 15 (lima belas) Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 (dua belas) Orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2 (dua) orang dan PPNPN untuk Satpam, Pengemudi dan Pramubakti sebanyak 11 (sebelas) orang, jumlah seluruhnya adalah 40 (empat puluh) orang.

3.

No	Nama	Pkt/Gol	Jab	Dik	Ket
I.	<b>Personel Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang</b>				
1.	Niarti, SH.MH	Kolonel Sus	Kadilmil	S2	-
2.	Yudi Pranoto Atmojo, S.H.	Letkol Chk	Wakadilmil	S1	Pindah Tugas Pada tanggal 22 Desember 2022
3.	L.M. Hutabarat, S.H.,M.H	Letkol Chk	Hakim	S2	-
4.	Dwi Yudo Utomo, S.H.,M.H.	Letkol Chk	Hakim	S2	-
5.	Nunung Hasanah, SH.MH	Letkol Chk (K)	Hakim	S2	-
6.	Sudiyo, S.H., M.H	Letkol Chk	Hakim	S2	-
7.	Zulkopli, SH.,MH	Mayor Chk	Panitera	S2	-
8.	Supriyadi, S.H., M.H	Mayor Chk	Sekretaris	S2	-
9.	Tobri Antony, S.H	Lettu Chk	Panitera Muda Hukum	S1	-
10.	Gunadi, S.H.	Lettu Chk	Panitera Muda Pidana	S1	-
11.	Sapriyanto, S.H	Peltu	Panitera Pengganti	S1	-
12.	Oktoriadi, S.H., M.H	Letda Chk	Pengelola Perkara pada Panmud Pidana	S2	Sedang melaksanakan Dikcabpa Abit Diktukpa
13.	Hari Wibowo, S.H	Serma	Pengelola Perkara pada Panmud Hukum	S1	-
14.	Rosita, S.H	Serma (K)	Pengelola Perkara pada PanmudHukum	S1	-
15.	Sarjito	Serka	Ajudan Subbag Umum & Keuangan	SMA	-
16.	Daroni	Kopka	Komandan Petugas Keamanan Subbag Umum & Keuangan	SMP	-

II. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Agustina Yanti, S.H.	Penata Tk.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1	-
2.	Febriansyah, S.H.	Penata	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	S1	-
3.	Devi Wahyuni, S.H.M.H	Penata	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	S2	-
4.	Medi Darmawansyah, S.H.M.H	Penata Tk-I	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S2	-
5.	Mona Anggreyni, S.I.P	Penata Muda	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S1	-
6.	Muhammad Nasir, S.H	Penata	Penyusun Laporan Keuangan Subbagian Umum dan Keuangan	S1	
7.	Yusyanto, S.H	Penata Muda Tk- I	Pranata Kearsipan Subbag Umum & Keuangan	S1	
8.	M. Maniar Marpaung	Penata Muda Tk-I	Pengadministrasian Persuratan Subbag Umum & Keuangan	SMA	-
9.	Sulistyo	Penata Muda Tk-I	Pengadministrasian Register Perkara pada Panmud Pidana	SMA	-
10.	Sorna Nauli Nasution, S.H	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran	S1	-
11.	Alexander S. Sihotang, SE	Penata Muda	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Subbagian P.TI.P	S1	-
12.	Srilanjari, A.Md	Pengatur	Pengelola Keuangan Sub bagian Umum dan Keuangan	D3	-
III. CPNS Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Niko Wijaya, A.Md	Pengatur	Pengelola Perkara Pada Panmud Pidana	D3	Diperbantukan di staf Kepegawaian & Ortala
2.	Berliana Cahyani, A.Md.A.B	Pengatur	Pengelola Perkara Pada Panmud Pidana	D3	-

IV.	PPNPN Pengadilan Militer I-04 Palembang				
1.	Joko Susanto	-	PPNPN Satpam	SMA	Diperbantukan di Staf Kepegawaian & Ortala
2.	Febriadi	-	PPNPN Pramubakti	SMA	Diperbantukan di Staf Perkara
3.	Joni Per, SH	-	PPNPN Pengemudi	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan
4.	Angga Wijaya,SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
5.	Sugeng Riadi, SE	-	PPNPN Satpam	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
6.	Zainul Arifin, S.Kom	-	PPNPN Satpam	S1	-
7.	Desly Farghani, SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.TI.P
8.	Andri Febriansyah, S.Pd	-	PPNPN Satpam	S1	-
9.	Muhammad Robi	-	PPNPN Satpam	SMA	-
10.	Iwan Kurniawan	-	PPNPN Satpam	SMA	-
11.	Eno Violita,SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan

### 3. TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 4. FUNGSI

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:  
Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
- d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### 1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun sebagai berikut :

##### a. Unsur Pimpinan

###### 1) Kepala Pengadilan Militer

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara mengevaluasinya untuk

dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

b. **Wakil Kepala Pengadilan Mliler.**

Melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

c. **Unsur Kepaniteraan.**

**Panitera**

membawahi antara lain :

1) **Panitera Muda Pidana.**

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana/ kejahatan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Lalu lintas
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2) **Panitera Muda Hukum.**

bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

3) **Panitera Pengganti**

Tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

d. **Unsur Kesekretariatan.**

**Sekretaris**

membawahi antara lain :

1) **Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.**

Bertugas membantu Bagian Perencanaan dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

2) **Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.**

Bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

3) **Kasub Bagian Umum dan Keuangan.**

Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a) Fungsional Arsiparis.
- b) Fungsional Pustakawan.
- c) Fungsional Pranata Komputer.
- d) Fungsional Bendahara.

e. **Unsur Pelaksana.**

1) **Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil**

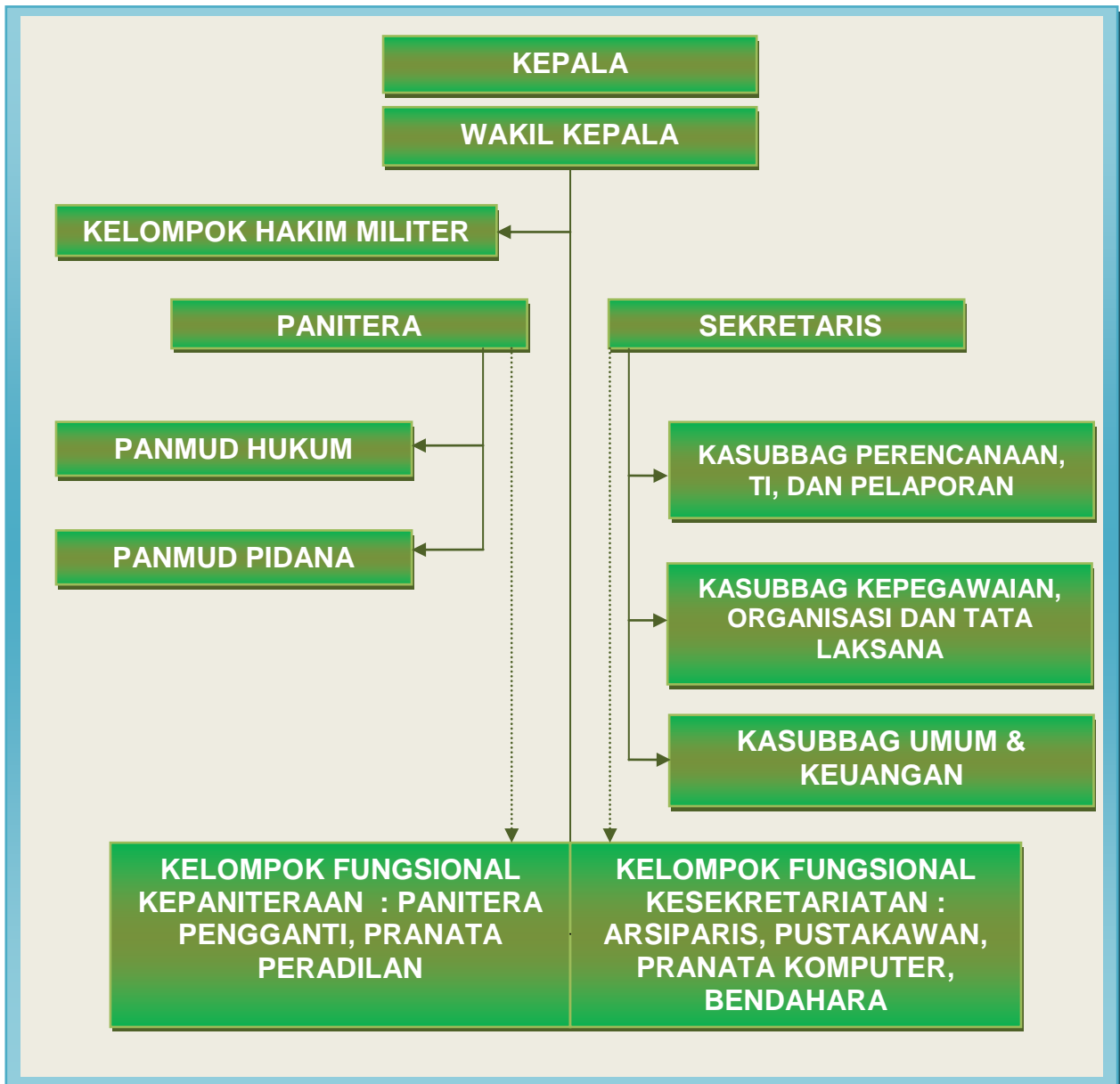
Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang

ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-hakim yang bersangkutan.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terlampir.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit TNI mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

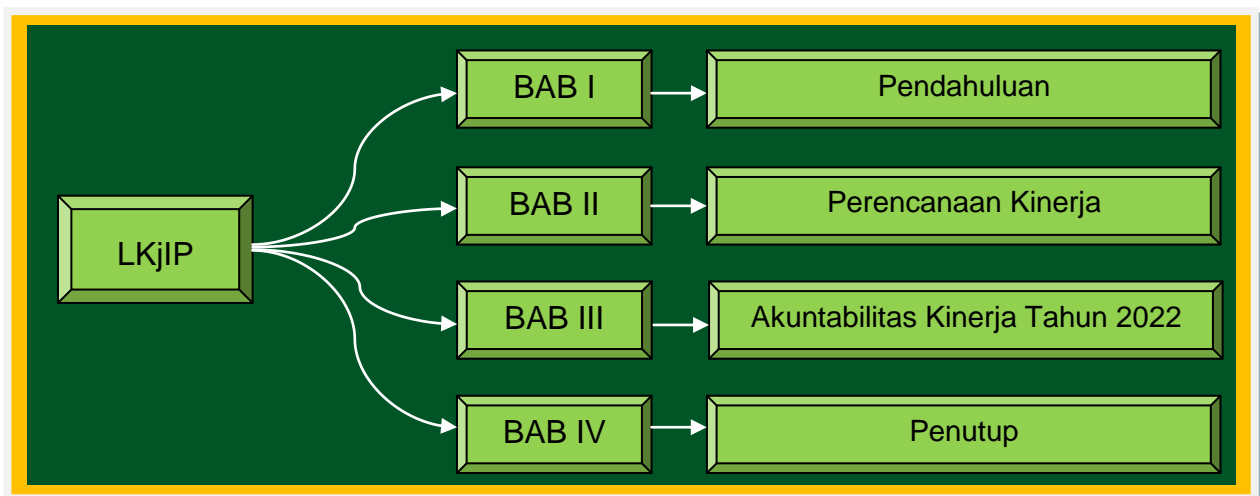
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-04 Palembang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-04 Palembang setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.
3. Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.

5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.
8. Pelaksanaan tugas pada wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja khususnya dalam hal menghadirkan para saksi yang berada di daerah yang jauh yang dapat membebankan biaya kepada para pencari keadilan.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022, sebagai berikut :



## **BAB I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III – Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang maupun *stakeholder eksternal*. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. VISI, MISI DAN MOTTO

##### a. Visi

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

1) Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2) Pengertian secara organisasional : Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah :

a) Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

b) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

**b. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

**c. Motto**

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersama Kita Bisa”**

## 2. TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu

pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
- c. Meningkatnya kepastian hukum

### **3. SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
  - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
  - 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
  - 4) Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) langkah penting yaitu :

**a. Perencanaan Strategis**

Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berperilaku Adil
- 3) Berperilaku Jujur
- 4) Berperilaku Bijaksana
- 5) Bertanggungjawab
- 6) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- 7) Berintegritas Tinggi
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Mandiri
- 11) Bersikap Profesional

**b. Penetapan Tujuan**

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-04 Palembang harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam melaksanakan tupoksi.
- 2) Terwujudnya aparatur Peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- 4) Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung Tupoksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

**c. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari :

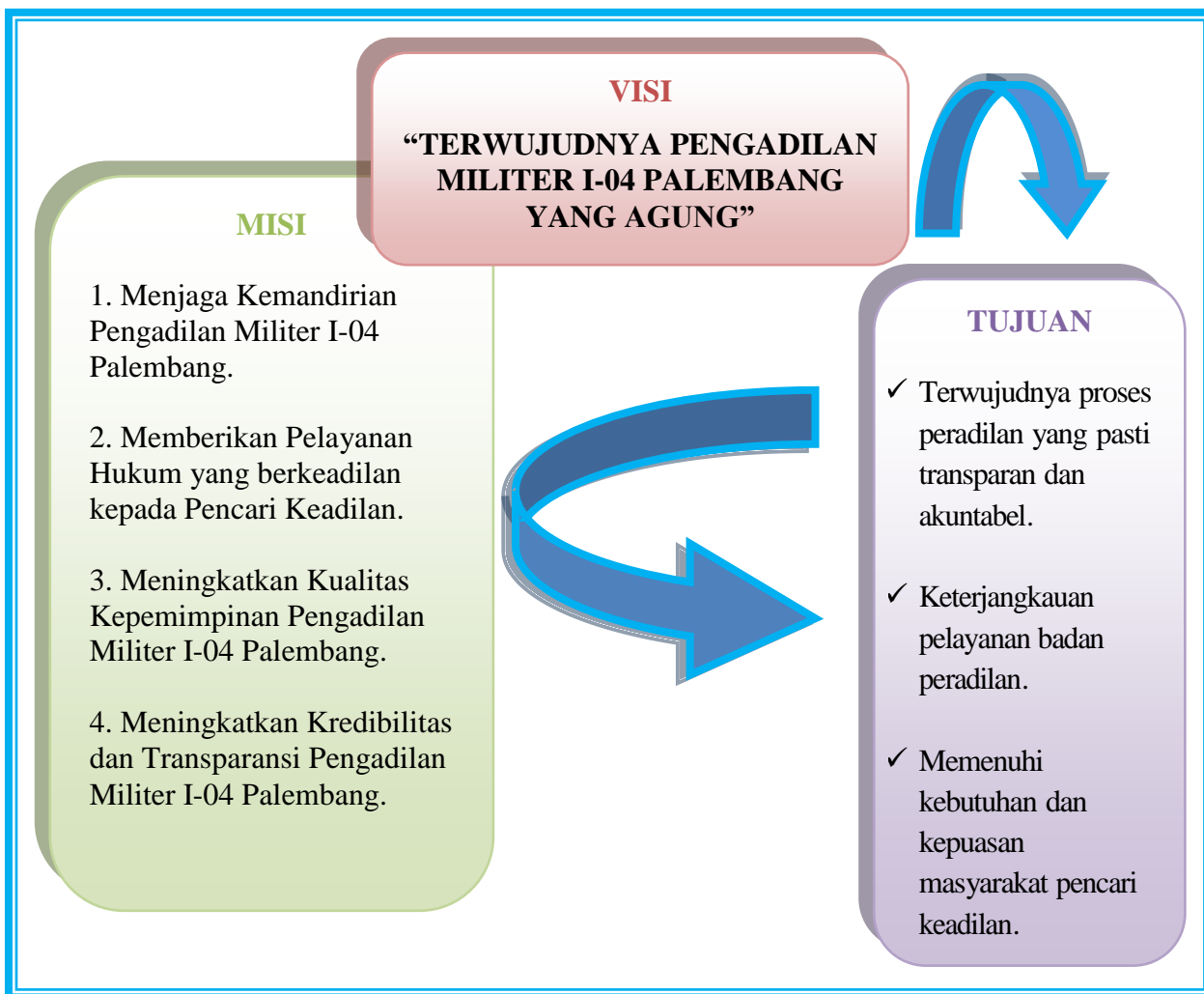
- a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
- c) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, pada TA. 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi</b>	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1.4 Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan;

	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



## RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Program	Kegiatan
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Pidana/Kejahatan dan Lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	97%	97%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	89%	90%	93%	93%	94%		
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	93%	93%	94%		
			Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	89%	90%	91%	92%	92%		
		2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

#### 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi kesepakatan bersama serta sebagai dasar bagi penetapan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja tahun 2022 secara singkat dapat dijelaskan dari tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Target	DIPA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<b>96%</b>  <b>93%</b>  <b>93%</b>  <b>91%</b>	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	12 Layanan	<b>4.579.316.000,-</b>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	<b>100%</b>	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	150 Perkara	<b>80.700.000</b>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<b>100%</b>	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	19 Perkara	<b>95.000.000</b>

#### KETERANGAN DAFTAR RENCANA KINERJA TAHUN 2022

##### 1.a. *Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- c. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- d. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- e. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar **96%** terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pidana/ kejahatan pada 5 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahunnya dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran lalu lintas serta realisasi pada Tahun-tahun sebelumnya sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara pelanggaran (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 96%. Dari target tersebut diharapkan capaian kinerja Dilmil I-04 Palembang dapat memenuhi target.

**1.b. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding* .**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar **93%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang tidak mengajukan upaya hukum

berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2018 dan Tahun 2021. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2022 sebesar 93% diharapkan dapat terpenuhi.

**1.c. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.***

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- c. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar **93%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2018 dan Tahun 2021. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2022 sebesar 93% diharapkan dapat terpenuhi.

**1.d. *Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.***

Persentase index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 sebesar **91%**, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 sebesar 91% diharapkan dapat terpenuhi.

**2. *Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.***

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- b. Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- d. Papera : Perwira Penyerah Perkara.
- e. Odmil : Oditur Militer.
- f. PM : Polisi Militer.
- g. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2022 sebesar **100%**. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditurat Militer I-04 Palembang segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2022 mencapai 100%.

**3. *Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan***

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- b. Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.

- c. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2022 sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2022 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp 4.579.316.000,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamahh Agung RI sebesar Rp 175.700.000 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

## **5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang berasal dari hasil survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Panitera/ Sekretaris	Laporan Triwulan, dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

## B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun reviu untuk Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

## C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan

RPJM 2020 – 2024. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA MARI)	Rp. 4.579.316.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun MARI)	Rp. 175.700.000,-
<b>Total</b>	<b>4.755.016.000,-</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

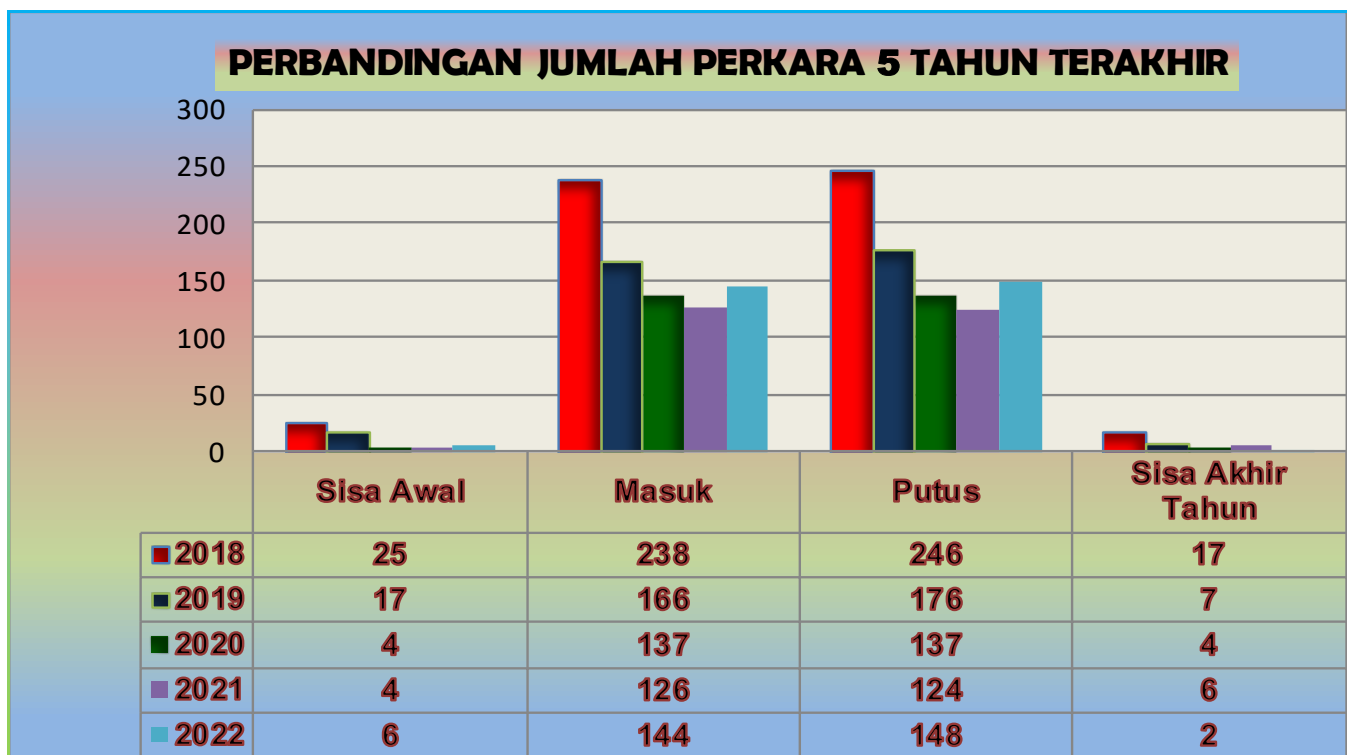
Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100%	104,2%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	89%	95,7%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	87,83%	94,4%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91	91,07	100,1%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

**PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA  
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2022**

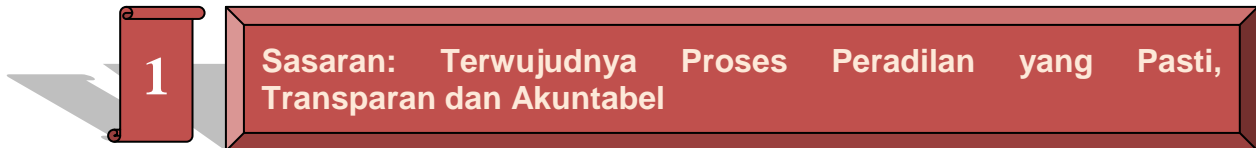
TAHUN	SISA AWAL	PIDANA		JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN
		KEJAHATAN	PELANGGARAN			
2018	25	178	60	238	246	17
2019	17	120	46	166	176	4
2020	4	110	27	137	137	4
2021	4	107	19	126	124	6
2022	6	113	31	150	148	2

**GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA  
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2022**



## 2. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun Anggaran 2022, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Secara garis besar realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukkan semua sasaran dicapai dengan baik bila dibandingkan dengan target Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.



Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 4 Pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100%	104,2%
2	b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	89,19%	95,7%
3	c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	87,8%	94,4%
4	d) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91%	91,07%	100,1%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### 1. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

#### a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2022 sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selamat tahun 2022 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara yang dihitung adalah jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya yang harus

diselesaikan pada tahun 2022 ditambah dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022. Berikut ini tabel penjelasan jumlah perkara pidana/ kejahatan dan pelanggaran lalu lintas dari sisa akhir tahun 2021 yang harus diselesaikan serta perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2022:

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	6	32	10	28
Februari	28	3	11	20
Maret	20	9	25	4
April	4	13	12	5
Mei	5	15	13	7
Juni	7	9	10	6
Juli	6	13	8	11
Agustus	11	10	9	12
September	12	12	5	19
Oktober	19	10	13	16
November	16	12	12	16
Desember	16	6	20	2
<b>Jumlah</b>		<b>144</b>	<b>148</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pidana/ kejahatan dan pelanggaran lalu lintas militer perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022 berjumlah 150 dengan 6 perkara sisa tahun 2021 dan 144 perkara yang masuk pada tahun 2022, sedangkan perkara yang telah diputus pada tahun 2022 berjumlah 148 perkara dengan sisa perkara berjumlah 2 perkara. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Perkara yang diselesaikan tepat waktu	:	148
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	148
Realisasi	:	$(148/148) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/96) \times 100\% = 104,2\%$

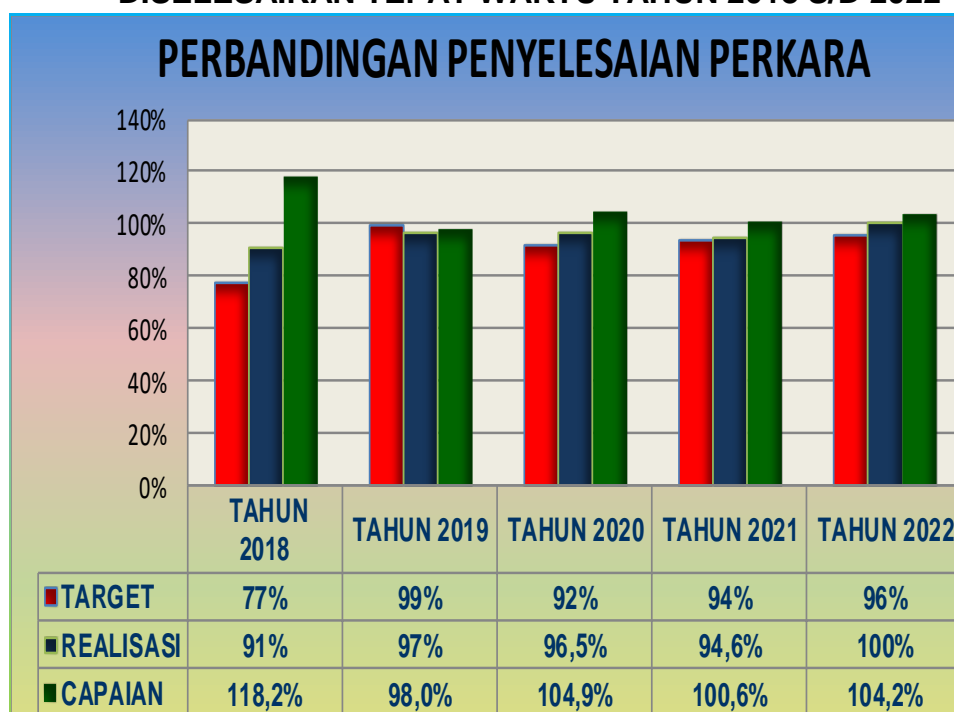
Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 100% (seratus persen) dengan tingkat capaian 104,2%. Pencapaian kinerja pada tahun 2022 yang telah menyelesaikan perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan dengan persentase 100% (seratus persen) tanpa terdapat perkara pidana militer diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan.

**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dibandingkan sama dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	77%	99%	92%	94%	96%	
REALISASI	91%	97%	96,5%	94,6%	100%	
CAPAIAN	118,2%	98%	104,9%	100,6%	104,2%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2018 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 realisasi yang didapatkan adalah 91% dengan capaian target sebesar 118,2%, pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 97% dengan capaian target sebesar 98%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%. Dari penjelasan

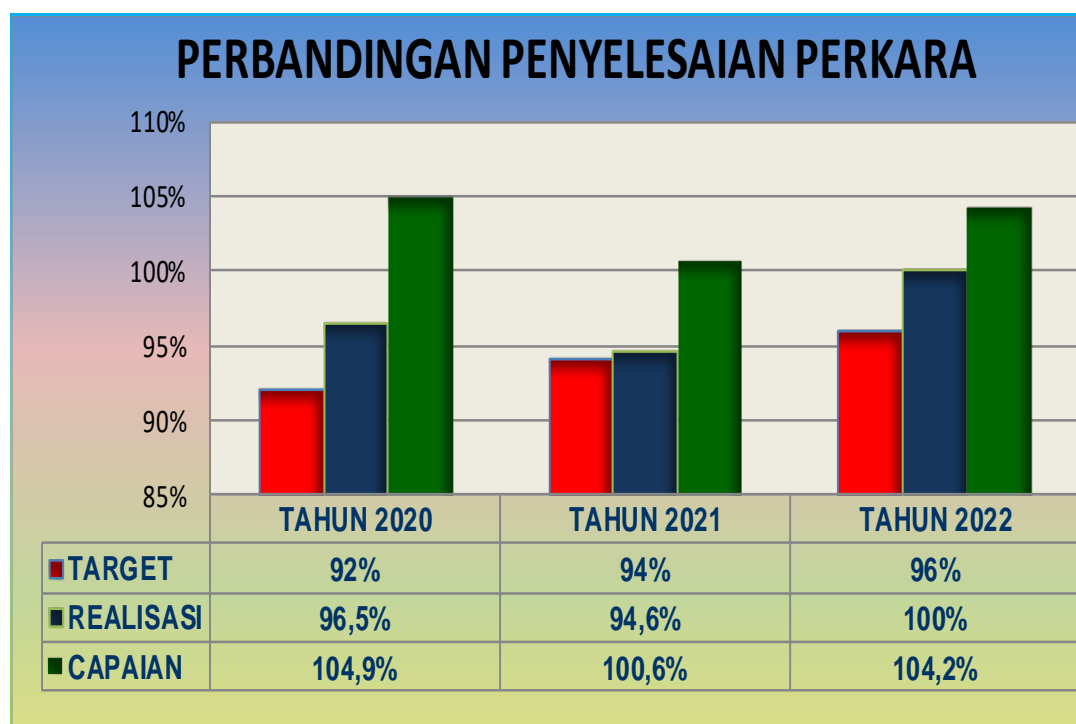
tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2022 ini adalah pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir namun untuk capaian target tertinggi adalah pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persentase target yang semakin meningkat dari 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2022. bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 adalah capaian realisasi tertinggi dan 2018 adalah realisasi terendah selama 5 tahun terakhir.

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	92%	94%	96%	97%	97%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	96,5%	94,6%	100%	-	-	
CAPAIAN	104,9%	100,6%	104,2%	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%. bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada capaian target tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 3,8% dan bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah dengan realisasi sebesar 100% dan capaian target sebesar 104,2%.

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah memenuhi target yang dapat terlihat pada tabel berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>104,2%</b>	Memenuhi target Mahkamah agung

**e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 tercapai serta melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 104,2% bahkan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 9,5%. Pencapaian tersebut sejalan dengan harapan Mahkamah Agung agar terciptanya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta peran dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan Waka Dilmil dimana Wakadilmil masuk pada 13 Juli 2022. Pada tahun ini pula terdapat pergantian/ mutasi bagi beberapa anggota Hakim dan unsur kepaniteraan. Pada bagian Kepaniteraan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis terdiri dari 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panmud Pidana, 1 (satu) Panmud Hukum dan 1 (satu) Panitera Pengganti. Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang. Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan bahkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu bisa melebihi target kinerja tahunan dan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

**2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

**a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui

kinerja penyelesaian perkara selama tahun 2022 dengan jenis perkara Pidana/kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2022 dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Berikut ini tabel perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2022	Upaya Hukum banding	Tidak mengajukan upaya Hukum Banding	Ket
1.	Jumlah Perkara	148	16	132	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 148 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara. Dari hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pengurangan dari jumlah perkara yang putus dan minutasi tahun 2022 dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 dengan hasil 132 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selama tahun 2022. Dari hasil tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

<b>Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</b>	:	<b>132</b>
<b>Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)</b>	:	<b>148</b>
<b>Realisasi</b>	:	<b><math>(132/148) \times 100\% = 89\%</math></b>
<b>Capaian</b>	:	<b><math>(89/93) \times 100\% = 95,7\%</math></b>

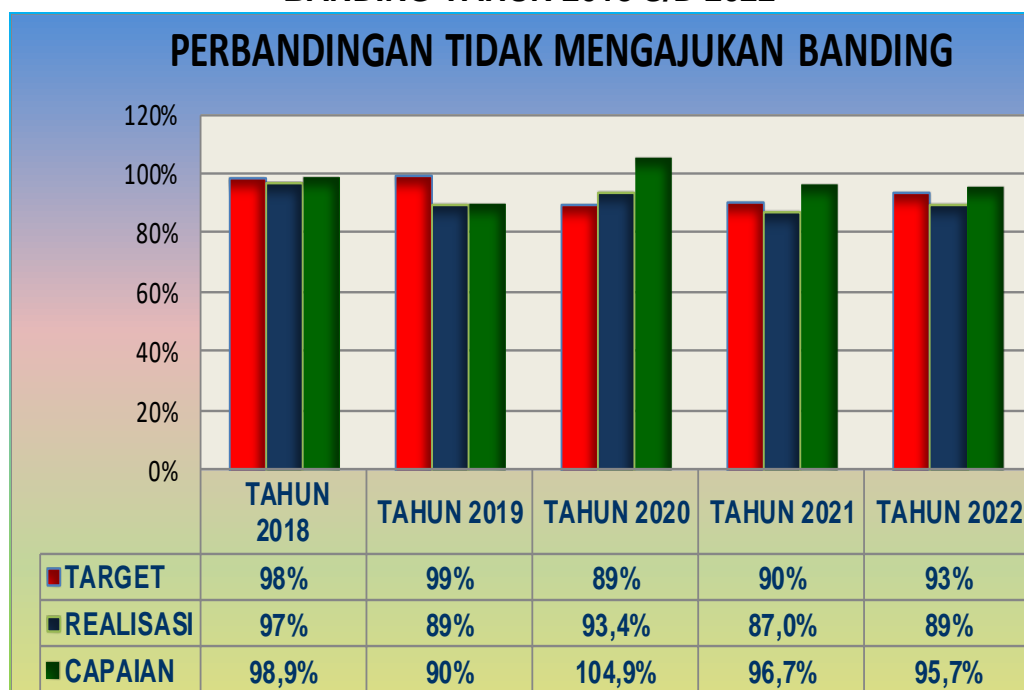
Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar 89% dan bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 93% diperoleh realisasi capaian sebesar 95,7%. Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 dapat dikategorikan melebihi target dengan tingkat realisasi capaian sebesar 95,7%.

**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan besaran capaian kinerja. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	98%	99%	89%	90%	93%	
REALISASI	97%	89%	93,4%	87%	89%	
CAPAIAN	98,9%	90%	104,9%	96,7%	95,7%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING TAHUN 2018 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 realisasi yang didapatkan adalah 97% dengan capaian target sebesar 98,8%, pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 89% dengan capaian target sebesar 89,9%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89,19% dengan capaian target sebesar 95,9%. Dari penjelasan

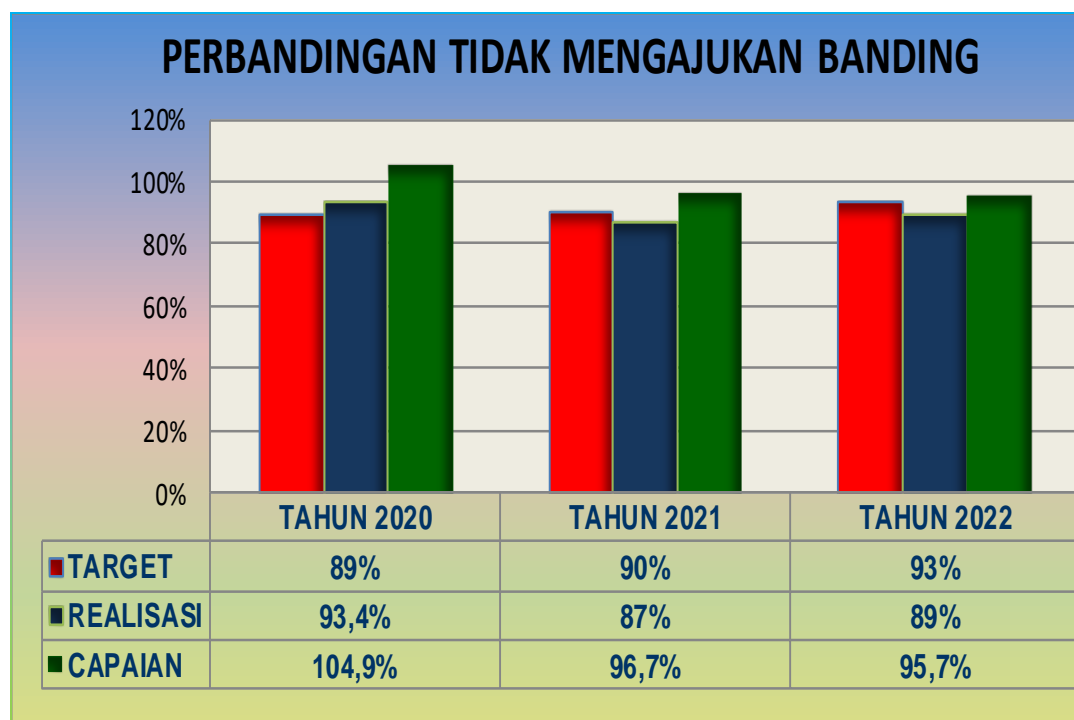
tersebut dapat diketahui bahwa capaian target pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,8% bila dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk capaian target tertinggi adalah pada tahun 2020 sedangkan capaian target terendah adalah tahun 2019. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan persentase realisasi serta capaian target selama 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2022.

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	93%	94%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	93,4%	87%	89%	-	-	
CAPAIAN	104,9%	96,7	95,7%	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89% dengan capaian target sebesar 95,9%. Dari penjelasan tersebut, Dilmil I-04 Palembang telah memenuhi target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

**d) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional**

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 93%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	93%	89%	95,7%	Memenuhi target Mahkamah agung

**e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 95,9%. Akan tetapi capaian tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian target sebesar 96,7% yaitu sebesar 9,5%. Secara umum Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Adapun faktor penyebab tercapainya persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah karena terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa dan/atau Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai

penerapan dalam hukum materiil dan hukum formil didalam persidangan agar terwujud pelayanan yang prima pada Dilmil I-04 Palembang.

Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif sehingga siapapun yang mendapatkan putusan tersebut bisa saja merasa adil baginya dan bisa pula merasa tidak puas/ tidak adil baginya sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum Banding guna mendapatkan rasa keadilan atas hasil putusan tersebut. "***Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan***" Atas dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan. Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Seperti dijelaskan diatas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mengoptimisasi semua sumber daya yang ada. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik dari unsur pimpinan dalam percepatan penyelesaian serta dorongan moril kepada seluruh anggota baik di bidang teknis maupun non teknis untuk selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari memberikan motivasi yang baik dalam pelaksanaan kinerja masing-masing anggota Dilmil I-04 Palembang

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

**3. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI**

**a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara pada tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Lalu perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah

perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selama tahun 2022 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2022 dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Berikut ini tabel perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2022	Upaya Hukum Kasasi	Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	Ket
1.	Jumlah Perkara	148	18	130	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 148 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18 perkara. Dari hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pengurangan dari jumlah perkara yang putus dan minutasi tahun 2022 dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 adalah sebanyak 130 perkara. Dari hasil tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	:	130
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	148
Realisasi	:	$(130/148) \times 100\% = 87,8\%$
Capaian	:	$(88/93) \times 100\% = 94,4\%$

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 87,8% dengan tingkat realisasi capaian 94,4% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 93%.

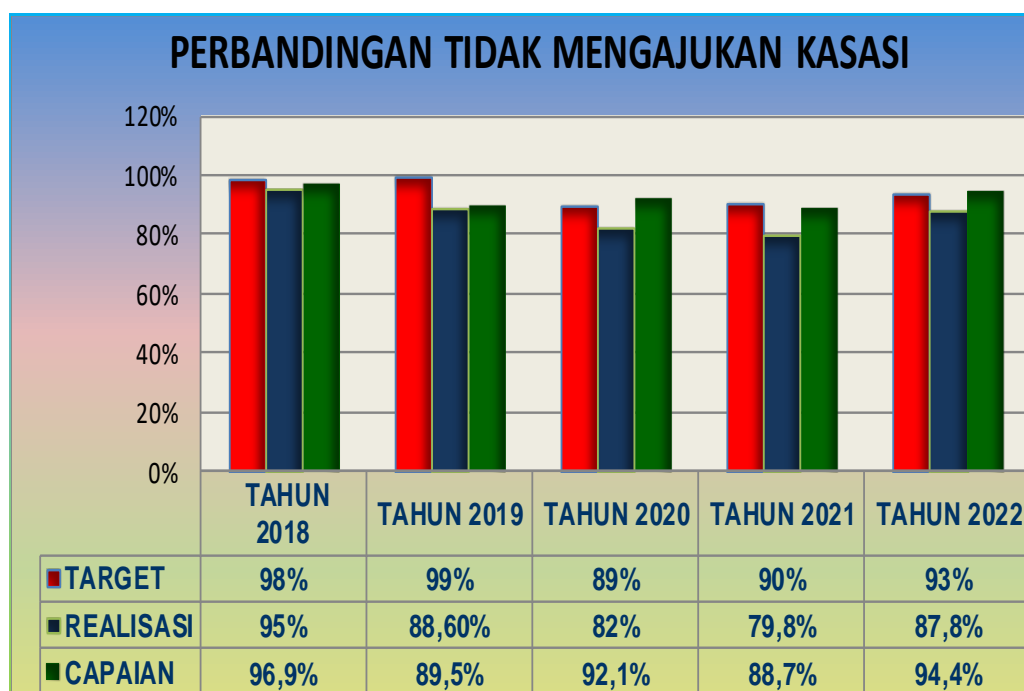
**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi akan adanya kenaikan dan penurunan

dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	98%	99%	89%	90%	93%	
REALISASI	95%	88,6%	82%	79,8%	87,8%	
CAPAIAN	96,9%	89,5%	92,1%	88,7%	94,4%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2018 S/D 2022**



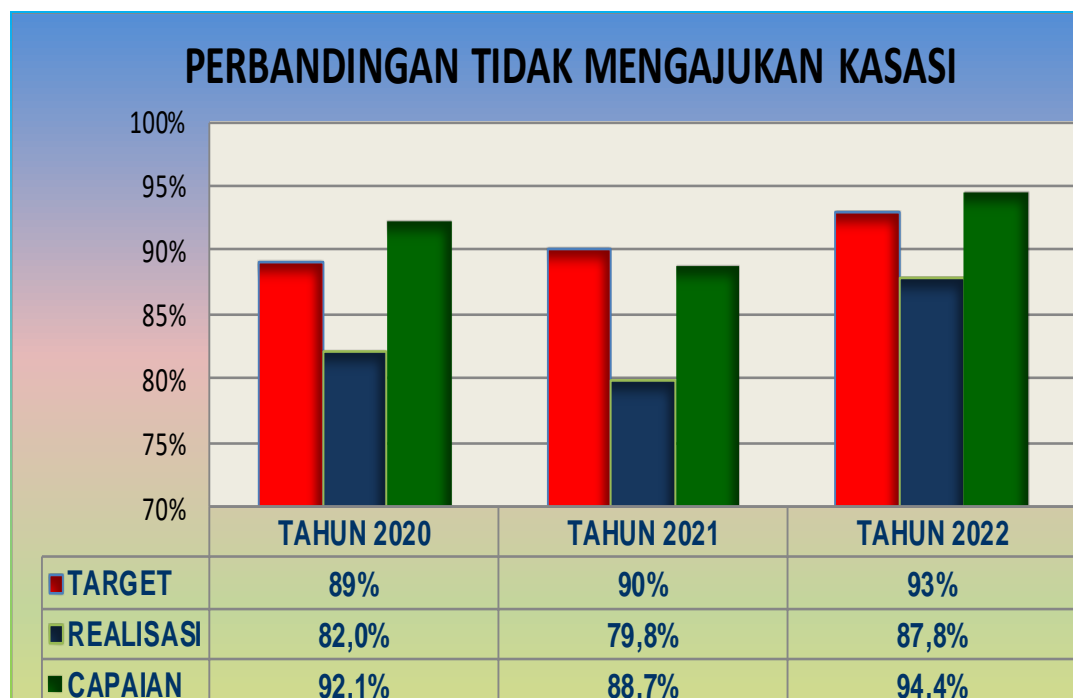
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 realisasi yang didapatkan adalah 95% dengan capaian target sebesar 96,9%, pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 88,6% dengan capaian target sebesar 89,5%, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 82% dengan capaian target sebesar 92,1%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 79,8% dengan capaian target sebesar 88,7%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 87,8% dengan capaian target sebesar 94,4%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2022 ini adalah capaian target tertinggi ke 2 (dua) bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir, namun untuk capaian target tertinggi ada pada tahun 2018. Sedangkan capaian target terendah ada pada tahun 2021 dengan capaian target sebesar 88,7%.

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	93%	94%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	82%	79,8%	87,8%	-	-	
CAPAIAN	92,1%	88,7%	94,4%	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 82% dengan capaian target sebesar 92,1%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 79,8% dengan capaian target sebesar 88,7%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 87,8% dengan capaian target sebesar 94,4%. bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target jangka

menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan telah memenuhi target jangka menengah tahun 2022 yang ditargetkan serta capaian target tahun 2022 menjadi capaian target tertinggi dalam capaian target jangka menengah.

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 93%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	93%	87,8%	94,4%	Memenuhi target Mahkamah agung

**e) Analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 95,7% bahkan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 5,7%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer bilamana dirasa dari hasil putusan tersebut terdapat ketidak-puasan atas hasil putusan yang dibacakan sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif.

Pada pelaksanaannya para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima. Dengan berpegang bahwa, "**Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan**" Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan

tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan. Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Seperti dijelaskan diatas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalisasi semua sumber daya yang ada. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam hukum Materiil dan hukum formil yang sudah dilaksanakan se-optimal mungkin oleh sumber daya manusia di Dilmil I-04 Palembang sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan bahkan persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi bisa melebihi target kinerja tahunan dan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

#### **4. INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN**

##### ***a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022***

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah index yang dihasilkan dari hasil pengisian survei kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan/ pengunjung di Dilmil I-04 Palembang. Secara garis besar masyarakat yang dimaksud adalah semua masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang , antara lain pengunjung sidang, para saksi, para pencari keadilan, satuan samping ( Otmil I-05 Palembang, Pomdam II/Swj, Lanal Palembang, Topdam II/Swj, Kumdam II/Swj dan Polresta Palembang).

Survei dilaksanakan selama para pengunjung hadir di lingkungan Dilmil I-04 Palembang secara langsung ataupun jikalau dalam pelaksanaan sidang keliling para penerima layanan diberikan angket survei untuk melihat pelayanan yang telah dilakukan oleh Dilmil I-04 Palembang. Survei ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar kepada perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan kinerja Dilmil I-04 Palembang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

**1. Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

**2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

**3. Waktu Penyelesaian**

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

**4. Biaya/Tarif**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

**5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

**6. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

**7. Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

**8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

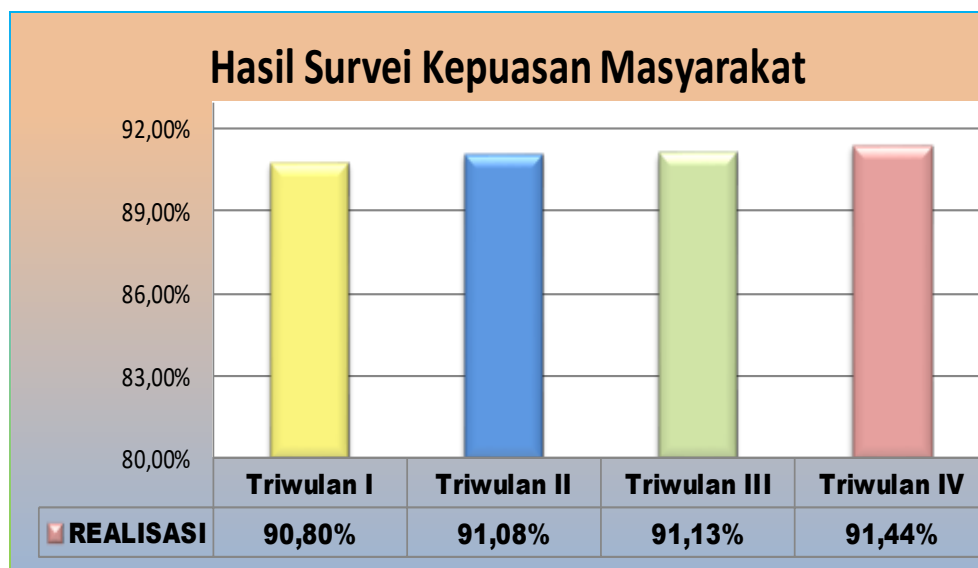
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

**9. Sarana dan prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Rekapitulasi hasil survei ini terbagi atas 4 waktu pelaksanaan yaitu survei pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Jumlah survei yang dikumpulkan pada setiap triwulannya diupayakan semaksimal mungkin dengan sistem *simple random sampling* atau dengan kata lain pengambilan secara acak kepada para masyarakat penerima layanan. Perhitungan capaian realisasi survei pada tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel dan grafik berikut ini:

<b>Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan (TW I + TW II + TW III + TW IV)</b>	:	<b>90,80 + 91,08 + 91,13+ 91,44</b>
<b>Realisasi (Jumlah TW I sampai TW IV Dibagi 4)</b>	:	<b>91,11</b>
<b>Capaian</b>	:	<b>(91,11/91) X 100 = 100,1%</b>



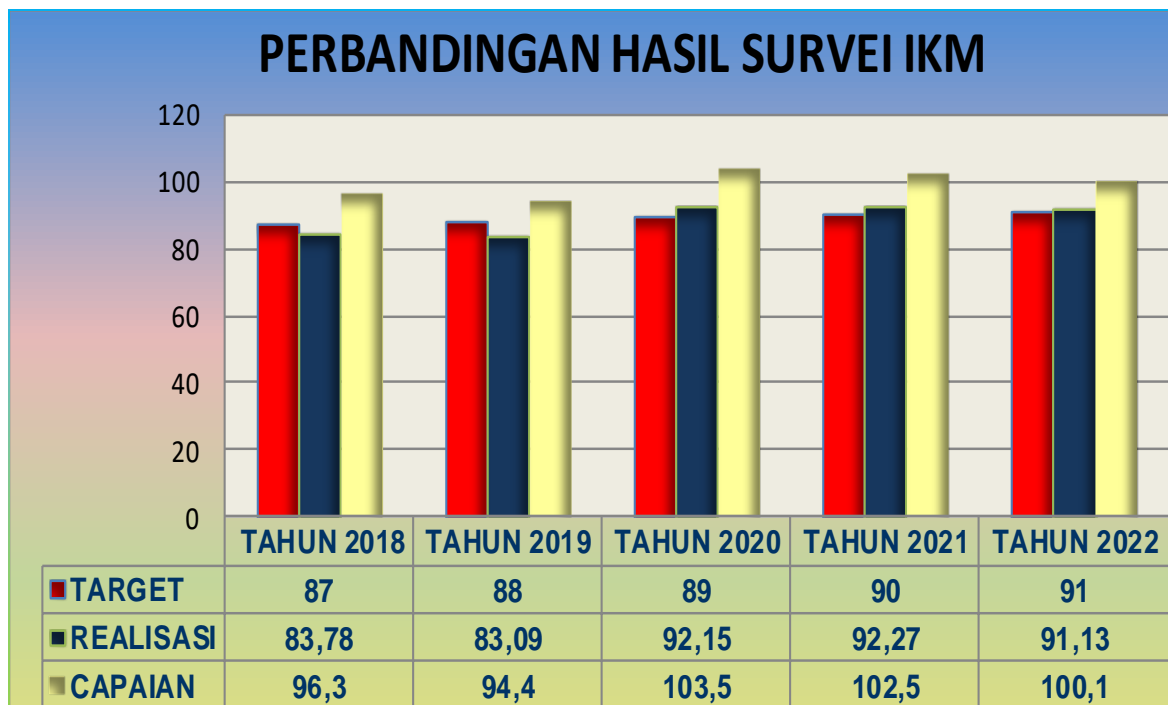
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat nilai dari hasil survei kepuasan masyarakat pada setiap triwulan pada tahun 2022. Pada triwulan I nilai survei kepuasan masyarakat adalah 90,8%, pada triwulan II nilai survei kepuasan masyarakat adalah 91,08%, pada triwulan III nilai survei kepuasan masyarakat adalah 91,13%, dan pada triwulan IV nilai survei kepuasan masyarakat adalah 91,44%. Dari hasil tersebut dilakukan penjumlahan dari tiap-tiap triwulan dan menghasilkan nilai realisasi sebesar 91,13% yang kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan target capaian dan hasilnya adalah sebesar 100,1%. Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 91,11% dengan tingkat capaian target 100,1%.

**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	87	88	89	90	91	
REALISASI	83,78	83,09	92,15	92,25	91,7	
CAPAIAN	96,3	94,4	103,5	102,5	100,1	

**GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2018 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 realisasi yang didapatkan adalah 83,78 dengan capaian target sebesar 96,30, pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 80,09 dengan capaian target sebesar 91, pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5, dan pada tahun 2022 realisasi

yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2020 adalah pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir namun untuk capaian target terendah adalah pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persentase target yang semakin meningkat dari 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2022. Bila dilihat pada hasil tersebut dari tahun 2018 sampai 2020 capaian yang didapat memiliki trend meningkat dan mengalami sedikit penurunan pada periode 2020 sampai 2022. Secara umum hasil capaian target dari tahun 2018 sampai dengan 2022 telah mencapai target capaian setiap tahunnya.

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89	90	91	91	92	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	92,15	92,27	91,07	-	-	
CAPAIAN	103,5	102,5	100,1	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5%, dan pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1%. bila dibandingkan dengan capaian target tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dari hasil tersebut dapat dikatakan pencapaian pada tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah dengan capaian target sebesar 100,1%.

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80. Berdasarkan Keputusan Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2022 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 91, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase Hasil Survei IKM	<b>80%</b>	<b>91%</b>	<b>91,07%</b>	<b>100,1%</b>	Memenuhi target Mahkamah agung

e) **Analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100,1%. Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik yang terbukti dalam keterbukaan informasi pada tahun 2022 Dilmil I-04 Palembang mendapatkan penghargaan peringkat ke II (dua) Pengadilan Terbaik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Militer tipe A, Dilmil I-04 Palembang juga membantu mahasiswa dari STIHPADA dan UNSRI dalam mengikuti Kompetisi *Moot Court* Peradilan Militer Piala tetap Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2022 yang diikuti oleh universitas/ sekolah tinggi se-Indonesia dimana mahasiswa/ I dari STIHPADA menjadi juara Harapan III se-Indonesia, serta kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dimana mahasiswa tersebut dapat melaksanakan magang serta dapat mengikuti persidangan yang dilaksanakan di Dilmil I-04 Palembang.

Beberapa langkah akan dilakukan untuk meningkatkan hasil realisasi kepuasan masyarakat untuk tahun 2023 yaitu dengan melihat hasil survei yang memiliki trend rendah selama tahun 2022. Rekapitulasi skor dan peringkat pada Survei Kepuasan Masyarakat dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Rata-rata Skor dan Peringkat pada Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Militer I-04 Palembang**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor				Kategori	Peringkat
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Persyaratan	3,385	3,673	3,519	3,583	SANGAT BAIK	5
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,404	3,615	3,538	3,521	BAIK	8
<b>3.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>3,288</b>	<b>3,596</b>	<b>3,538</b>	<b>3,542</b>	<b>BAIK</b>	<b>9</b>
4.	Biaya/Tarif	3,750	3,808	3,731	3,792	SANGAT BAIK	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,404	3,500	3,577	3,667	SANGAT BAIK	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,442	3,558	3,673	3,688	SANGAT BAIK	4
7.	Perilaku Pelaksana	3,577	3,615	3,692	3,604	SANGAT BAIK	3
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,365	3,500	3,673	3,583	BAIK	7
9.	Sarana dan Prasarana	3,846	3,923	3,865	3,938	SANGAT BAIK	1

Dari tabel diatas dapat terlihat peringkat dari yang tertinggi sampai terendah dalam penilaian masyarakat atas pelayanan Dilmil I-04 Palembang. Nilai tertinggi ada pada indikator sarana dan prasarana yang ada di Dilmil I-04 Palembang. Salah satu yang menjadi unggulan adalah adanya ruang istiahat berupa gazebo, ruang bermain anak, dan kantin kejujuran. Sedangkan nilai terendah ada pada indikator waktu penyelesaian dimana pada bagian tersebut memiliki pertanyaan “Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?”. Dari hasil survei ditemukan bahwa salah satu yang menjadi penilaian masyarakat adalah ketidaktepatan dalam waktu pelaksanaan sidang dengan jadwal yang telah disampaikan.

Ketidaktepatan dalam waktu pelaksanaan sidang memiliki beberapa faktor utama mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini terjadi karena jarak tempuh dari para pihak baik itu terdakwa maupun saksi mengingat luasnya wilayah hukum Dilmil I-04 Palembang yang tergolong jauh membuat terdakwa maupun saksi terlambat hadir tepat waktu sehingga persidanganpun menjadi mundur untuk menunggu saksi maupun terdakwa. Kemudian para hakim bisa ikut dalam 1 (satu) majelis dengan 2-3 perkara sehingga harus begantian waktu dan menunggu dalam menyelesaikan sidang begitu pula dengan Panitera yang bisa menangani lebih dari 2 perkara dalam 1 hari.

Untuk menanggulangi hal tersebut beberapa upaya telah dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut. Kadilmil dalam monitoring dan evaluasi kinerja memberikan himbauan agar pelaksanaan persidangan dapat dilaksanakan tepat waktu serta administrasi perkara dan administrasi persidangan dibuat sesuai dengan format yang benar. Lalu langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada para pihak agar dapat datang tepat pada waktunya. Upaya-upaya ini akan dilakukan kedepannya dengan harapan dapat memberikan *outcome* yang baik bagi masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan hukum materiil dan hukum formil yang berlaku serta sumber daya manusia non teknis dalam mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum agar tercipta rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Beberapa penilaian yang cenderung “Sangat Baik” ada pada sarana dan prasarana yang ada pada Dilmil I-04 Palembang. Nilai tertinggi ke dua ada pada tarif pelayanan karena Dilmil I-04 Palembang tidak menetapkan tarif/ gratis dan tidak melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan. Nilai tertinggi ke 3 ada pada perilaku pelaksana atau secara keseluruhan anggota di Dilmil I-04 Palembang. Hal ini menggambarkan seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang telah mampu menjaga marwah Mahkamah Agung RI secara khusus profesionalisme Dilmil I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

**a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.**

Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). Berikut ini tabel perbandingan pencapaian target kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu:

Bulan	Putus	Dikirim ke Oditur dan Terdakwa	Ket
Januari	10	10	
Februari	11	11	
Maret	25	25	
April	12	12	
Mei	13	13	
Juni	10	10	
Juli	8	8	
Agustus	9	95	
September	5	5	
Oktober	13	13	
November	12	12	
Desember	20	20	
<b>Jumlah</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	:	148
Jumlah putusan	:	148
Realisasi	:	$(148/148) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	100 %	100 %	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan persentase Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu adalah 100% sehingga jika dibandingkan dengan target realisasi sebesar 100% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%: Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dapat dikategorikan mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 100% dengan tingkat realisasi capaian 100% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 100%.

**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2018 S/D 2022**



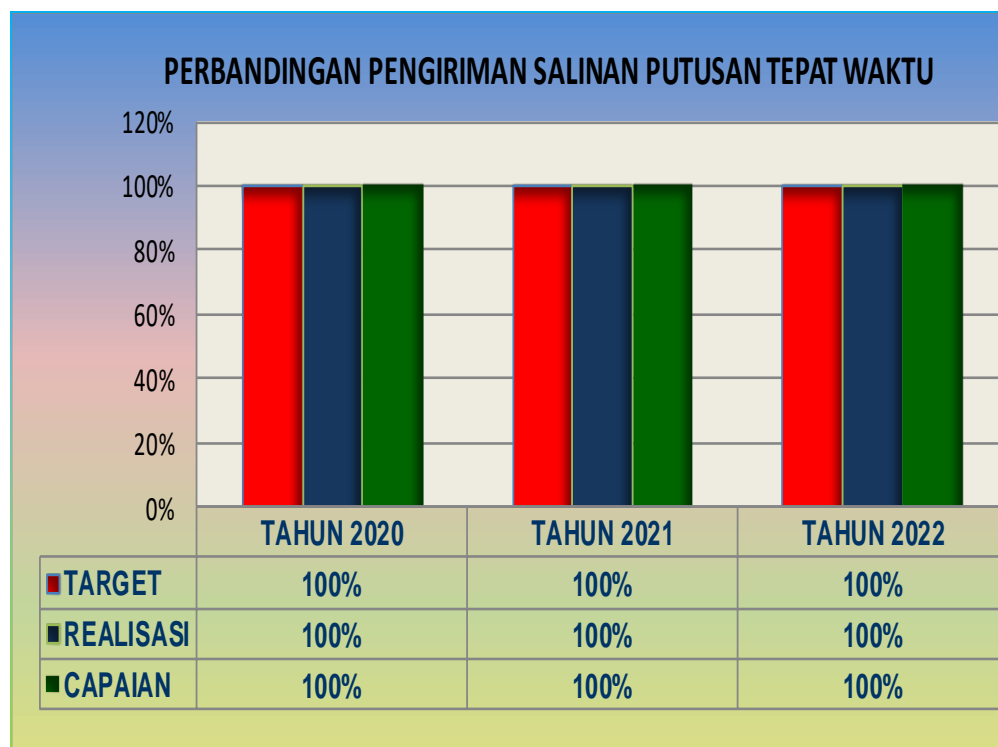
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 5 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 5 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%.

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	100%	100%	-	-	
CAPAIAN	100%	100%	100%	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2022 dengan tahun lalu dan target jangka menengah, dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 3 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 3 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%.

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP”. Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 20% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
<b>persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Memenuhi target Mahkamah agung

**e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% bahkan bernilai sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan memenuhi target jangka menengah. Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

Pencapaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011. Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Pada Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya. Dengan sumber daya manusia yang tersedia pada bagian persuratan maupun pada bagian pengarsipan dapat berjalan dengan baik walaupun pada saat ini Dilmil I-04 Palembang belum memiliki ASN fungsional dalam bidang Arsiparis tetapi dengan kekuatan anggota yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional. Dengan komposisi tenaga teknis dan non teknis tersebut pada tahun 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyampaikan salinan putusan dari semua perkara yang ditangani sebanyak 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) perkara tanpa ada salinan putusan yang terlambat dalam penyampiannya kepada Oditur ataupun terdakwa.

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara

**3**

**Sasaran: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

**a) . Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.**

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus di rensidkan di luar Gedung Pengadilan. Persentase

Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100 %. Perkara yang direncanakan sidang di Luar Gedung Kantor dapat diputus sebanyak 19 (sembilan belas) perkara dari 19 (Sembilan belas) perkara yang di rensidkan. Berikut adalah tabel pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2022:

Bulan	Dirensid	Putus	Ket
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei	6	6	
Juni	3	3	
Juli			
Agustus			
September			
Oktober	10	10	
November			
Desember			
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	

Dari hasil tersebut, langkah selanjutnya adalah perhitungan capaian target dari

Jumlah Perkara yang di rensid	:	19
Jumlah putusan	:	19
Realisasi	:	$(19/19) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

**b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja pada tahun 2021 menjadi pencapaian terkecil selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2018	2019	2020	2021	2022	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	100%	100%	91%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	100%	91%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI  
LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2018 S/D 2022**



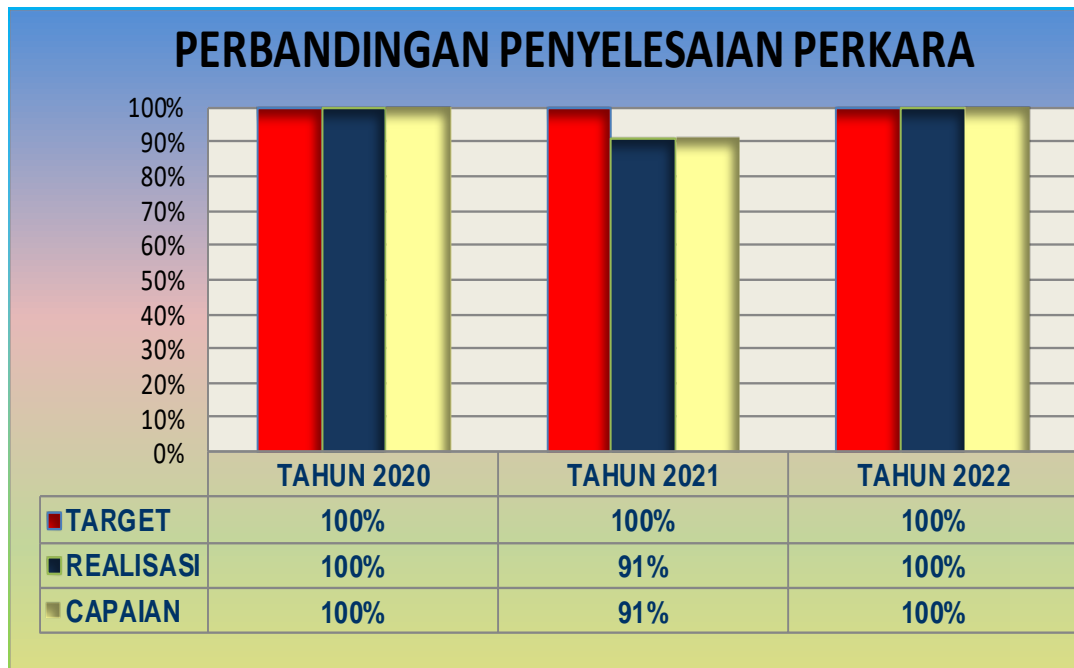
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2018 sampai 2020 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2021 tidak dapat memenuhi target tersebut. Pada tahun 2022 Dilmil I-04 Palembang berhasil mencapai target dengan capaian target sebesar 100%.

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

berikut adalah tabel serta grafik perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	91%	100%	-	-	
CAPAIAN	100%	91%	100%	-	-	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN  
DILUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020 S/D 2022**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2022 dengan tahun lalu dan target jangka menengah. dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun terakhir 2020 dan 2022 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 Dilmil I-04 Palembang tidak dapat memenuhi capaian target dengan capaian target sebesar 91%.

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang dilaksanakan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang tahun 2022 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sama bahwa Mahkamah Agung RI menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 100% demikian pula Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

**e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% bahkan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 9%. Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

**f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang.

Pada Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya. Dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas penyelesaian perkara secara proporsional, Kadilmil dan Wakadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja sehingga mampu mewujudkan pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para Staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan yang berada di satuan ketika sidang keliling dilaksanakan, seperti penginputan data perkara pada aplikasi SIPP harus dilakukan di satuan. Dengan kerjasama semua bagian tersebut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2022 dapat memenuhi target kinerja yang telah di tetapkan.

**g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2022.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2022.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*. Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-04 Palembang, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **1. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (BUA)**

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam Lingkungan Mahkamah Agung, pada awal tahun anggaran 2022 telah menerima “DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022” dengan Nomor : 005-01-2-663211/2022 tanggal 17 November 2021 dengan PAGU sebesar Rp. 4.579.316.000.00,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), dalam kurun waktu 2022 DIPA BUA mengalami 5 (lima) kali Revisi DIPA yang terdiri dari :

- Revisi ke 1 (satu) pada tanggal 13 April 2022
- Revisi ke 2 (dua) pada tanggal 29 Juni 2022
- Revisi ke 3 (tiga) pada tanggal 26 Oktober 2022
- Revisi ke 4 (empat) pada tanggal 29 November 2022
- Revisi ke 5 (lima) pada tanggal 30 November 2022

**a. Belanja Pegawai**

Data penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2022  
Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	2.720.162.000	2.715.240.972	4.921.028	99,82 %	

**b. Belanja Barang**

Data penyerapan anggaran belanja barang tahun 2022  
Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	1.508.746.000	1.482.221.000	26.525.000	98,24 %	

**c. Belanja Modal**

Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2022 Pengadilan  
Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	210.445.000	193.370.000	17.075.000	91.89 %	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2022 berdasarkan grafik diatas adalah sebesar Rp 4.390.831.972 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar 98,91% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) dengan sisa pagu sebesar Rp 48.521.028,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau 1,09 % (satu koma nol sembilan persen).

**2. Pengelolaan Keuangan DIPA 05 (Direktorat Badilmiltun)**

Data penyerapan pengelolaan anggaran untuk DIPA 05 (Ditjen) Badilmiltun MA RI TA. 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1.	Belanja Opr Perkara	80.700.000	64.297.100	16.402.900	79,67	
2.	Sidang Keliling	95.000.000	94.806.300	193.700	99,79	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Tahun 2022 berdasarkan grafik diatas adalah sebesar Rp 159.103.400,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar 90,55 % (sembilan puluh koma lima puluh lima persen) dengan sisa pagu sebesar Rp 16.596.600,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau 9,45 % (sembilan koma empat puluh lima persen).

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2022 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

## B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen *control* yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, 17 Februari 2023  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG SESUAI PERMA 7 TAHUN 2015



**KEPALA**  
NIARTI, S.H., M.H.  
KOLONEL SÚS NRP. 522941



**WAKIL KEPALA**

**POKKIMMIL**  
DWI YUDO UTOMO, S.H., M.H.  
LETKOL CHK NRP. 607952  
NUNUNG HASANAH, S.H., M.H.  
LETKOL CHK (K) NRP. 11970027910670  
L.M. HUTABARAT, S.H., M.H.  
LETKOL CHK NRP. 15980016220468  
SUDIYO, S.H., M.H.  
LETKOL CHK NRP. 2320066551169



**PANITERA**  
ZULKOPLI, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP. 1106002741279



**SEKRETARIS**  
SUPRIYADI S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP. 21950303390275



**PANMUD PIDANA**  
GUNADI, S.H.  
LETTU CHK NRP 21010051510681

ONTORJADI, S.H., M.H.  
SERMA NRP. 21030075671085  
SULISTIYO  
PENATA MUDA TK I NIP. 1969100011991031007  
BERLIANA CAHYANI, A.Mg., A.B.  
PENGATUR NIP. 199706132022032020



**PANMUD HUKUM**  
TOBRI ANTONY, S.H.  
LETTU CHK NRP. 21000015161077

HARI WIBOWO, S.H.  
SERMA NRP. 21030068001785  
ROSIITA, S.H.  
SERMA (K) NRP. 21850319220386



**KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN**  
FEBRIANSYAH, S.H.  
PENATA NIP. 1980022320060410011

ALEXANDER S. SIMOTANG, S.E.  
PENATA MUDA NIP. 199209072000711004



**KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA**  
DEVI WAHYUNI, S.H., M.H.  
PENATA NIP. 198509142009042006

NIKO BIKAYA, A.Mg.  
PENGATUR NIP. 199310102022031006



**KASUBBAG UMUM & KEUANGAN**  
AGUSTINA YANTI, S.H.  
PENATA TK I NIP. 196708151989032002

SARJITO  
SERKA NRP. 3197000200175  
BARONI  
KOPTU NIP. 31990387991079  
MUHAMMAD NASIR, S.H.  
PENATA NIP. 198205132000041004  
YUSYANTO, S.H.  
PENATA MUDA TK I NIP. 196804151991031003  
M MANIAR MARPAUNG  
PENATA MUDA TK I NIP. 196802081991032001  
SORNA NAULI NASUTION, S.H.  
PENATA MUDA NIP. 198606032011012023  
SRI LANJARI, A. Mg.  
PENGATUR NIP. 1993060220122012

**PANITERA PENGGANTI**  
SAPRIYANTO, S.H.  
PELTU NIP. 2185034680074

**FUNGSIONAL**  
MEDI DARHAWANSYAH, S.H., M.H.  
PENATA TINGKAT I NIP. 198503312006041003  
WONA ANGGREYNI, S.I.P.  
PENATA MUDA NIP. 199405162019032009





## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

### CAPAIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
a.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	1. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	104,2%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93%	100%	95,7%
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	100%	94,4%
		4. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	91%	91,13%	100,1%
b.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

Mengetahui  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

### DAFTAR PEGAWAI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG MENGIKUTI DIKLAT TAHUN 2022

No	Nama Pangkat/Gol/NRP/NIP	Kegiatan	Penyelenggara
<b>JANUARI 2022</b>			
<b>NIHIL</b>			
<b>FEBRUARI 2022</b>			
1.	Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti	Balitbang Diklat Kumdil MARI
<b>MARET 2022</b>			
1.	Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Gelombang I	Balitbang Diklat Kumdil MARI
2.	Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Gelombang II	Balitbang Diklat Kumdil MARI
3.	Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Gelombang III	Balitbang Diklat Kumdil MARI
4.	Riza Pahlipi, Peltu NRP 21950302480573	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Gelombang III	Balitbang Diklat Kumdil MARI
5.	- Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 - Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik	Balitbang Diklat Kumdil MARI
6.	- Alexander S. Sihotang, S.E., Penata Muda NIP 199209072020121004 - Srilanjari, A.Md., Pengatur NIP 199309082020122012	Peserta E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan II TA 2022	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu RI
7.	- Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 - Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	Dilmiltama Balitbang Diklat Kumdil MARI
8.	- Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 - Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671	Bimbingan Teknis Hakim Militer TA 2022	Dirjen Badilmiltun MARI

APRIL 2022			
1.	- Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - Supriyadi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275 - Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178	Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Prov. Sumsel	SE Ketua DPR RI/Korpolkam
MEI 2022			
1.	Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077	Bimbingan Teknis Kompetensi di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI
2.	- Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 - Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169	Meningkatkan Kompetensi Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI
3.	Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 11970027910670	Bimbingan Teknis Panitera/Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI
JUNI 2022			
1.	Riza Pahlipi, Peltu NRP 21950302480573	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2022	Dilmiltama
2.	Medi Darmawansyah, S.H., M.H., Penata Tk I NIP 198605312006041003	Kegiatan Sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Billing Perbendaharaan	Kanwil DJPb Sumsel
3.	- Medi Darmawansyah, S.H., M.H. Penata Tk I NIP 198605312006041003 - Sorna Nauli Nasution, S.H., Penata Muda NIP 198606032011012023	Kegiatan FGD Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Migrasi SAKTI Satker Lingkup KPPN Palembang	KPPN Tipe A1 Palembang
4.	- Medi Darmawansyah, S.H., M.H., Penata Tk I NIP 198605312006041003 - Muhammad Nasir, S.H., Penata NIP 198205132006041004	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Evaluasi atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 untuk Satker dalam lingkup Pembayaran KPPN Palembang.	KPPN Tipe A1 Palembang
5.	Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670	Bimbingan Teknis Kompetensi bagi Para Tenaga Teknis Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI
6.	- Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	Dilmilti I Medan

	11980001820468 - Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952 - Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 - Sudiyo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 - Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 - Supriyadi, S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275 - Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178		
7.	Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 11970027910670	Kegiatan Rapat Koordinasi Komuniti Hukum Kodam II/Swj Tw. II TA. 2022	Stumdam II/Sriwijaya
<b>JULI 2022</b>			
1.	Srilanjari, A.Md, Pengatur NIP 199309082020122012	Kegiatan E-learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan VIII TA. 2022	- Kemenkeu - Pusdiklat AP
2.	Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169	Kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer seluruh Indonesia	- Balitbang Diklat Kumdil MARI - Dirjen Badilmiltun MARI
3.	Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169	Kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer	- Balitbang Diklat Kumdil MARI - Dirjen Badilmiltun MARI - Dilmiltama
4.	- Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 - Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952	Kegiatan Eksaminasi Bagi Calon Hakim Militer TA. 2022	Dirjen Badilmiltun MARI
5.	- Medi Darmawansyah, S.H.,M.H., Penata Tk I NIP 198605312006041003 - Muhammad Nasir, S.H., Penata NIP 198205132006041004	Sosialisasi Implementasi Digital Payment (Digipay) dan KKP dengan PT. Bank BRI (Persero)	- Kanwil DJPb Provinsi Sumsel
6.	Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Naskah Akademik TA. 2022	- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI - Dilmiltama

**AGUSTUS 2022**

1.	Devi Wahyuni, S.H., M.H., Penata NIP 198509142009042006	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen ASN Angkatan 4 Tahun 2022	Balitung Diklat Kumdil MARI
2.	- Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 - Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952 - Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 - Supriyadi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275 - Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 - Agustina Yanti, S.H. Penata Tk I NIP 196708151989032002	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI
3.	- Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 - Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974	Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA. 2022	Dirjen Badilmiltun MARI
4.	- Supriyadi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275 - Mona Anggreyeni, S.I.P, Penata Muda NIP 199405162019032009	Kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariatan Pengadilan Militer	Dilmiltama
5.	- Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Letkol Chk NRP 1990019321274 - L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1980001820468 - Dwi Yudo Utomo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 607952 - Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 - Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 - Supriyadi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950303390275 - Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 - Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 - Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974	Pembekalan Kadilmiltama dan Pembekalan tentang Money Cripto serta Pembekalan Perkara Koneksitas	Dilmiltama
6.	- Niko Wijaya, A.Md, Pengatur NIP 199310102022031006 - Berliana Cahyani, A.Md.A.B., Pengatur NIP 199706132022032020	Pembelajaran Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama Dengan BPSDMD Prov. Sumsel Gol. II Angkatan VIII dan IX Tahun 2022	Balitung Diklat Kumdil MARI

7.	Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA. 2022	Dilmiltama
8.	- Srilanjari, A.Md, Pengatur NIP 199309082020122012 - Niko Wijaya, A.Md, Pengatur NIP 199310102022031006	Bimbingan Teknis Kepegawaian TA. 2022	Dilmilti I Medan
9.	Oktoriadi, S.H., M.H., Serma NRP 21050075671085	Kegiatan Pendidikan Secapaad Gelombang II TNI AD TA. 2022	- KASAD - Dilmiltama
10.	Oktoriadi, S.H., M.H., Serma NRP 21050075671085	Seleksi Tingkat Pusat Diktukpa Gelombang II TNI AD	- KASAD - Dilmiltama
11.	- Devi Wahyuni, S.H., M.H., Penata NIP 198509142009042006 - Febriansyah, S.H., Penata NIP 198002232006041001	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 s.d. 3 Tahun 2022	Balitang Diklat Kumdil MARI
<b>SEPTEMBER 2022</b>			
1.	Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670	Melaksanakan Tugas Mendampingi sebagai Mentor Peserta Latsar CPNS Golongan II Angkatan VIII dan IX Tahun 2022	Balitbang Diklat Kumdil MARI
2.	Devi Wahyuni, S.H., M.H., Penata NIP 198509142009042006	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Angkatan II dari Tempat Tugas Tahun 2022	Balitbang Diklat Kumdil MARI
3.	Mona Anggreyni, S.I.P, Penata Muda NIP 199405162019032009	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Angkatan IV dari Tempat Tugas Tahun 2022	Balitbang Diklat Kumdil MARI
4.	Devi Wahyuni, S.H., M.H., Penata NIP 198509142009042006	Pelatihan Online Penyusunan SPIP Integratif Angkatan 3 dari Tempat Tugas	Balitbang Diklat Kumdil MARI
<b>OKTOBER 2022</b>			
1.	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952	Kegiatan Rapat Pembentukan/Penyisipan Pengurus IKAHI Daerah	PT Palembang
2.	- Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Letkol Chk NRP 11990019321274 - Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279	Sosialisasi Peraturan/Keputusan Panglima TNI dan Reformasi Birokrasi Penataan Peraturan Perundang- Undangan TNI TA. 2022	Babinkum TNI
3.	- Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952 - L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP	Pendampingan Audiensi dan Konsultasi mengenai kasus Posisi NMCC MA XXV dalam rangka kegiatan	Director Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Sriwijaya

	11980001820468 - Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 - Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 - Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279 - Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 - Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974	kompetisi Moot Court Peradilan Militer Piala Tetap Kepala Staf Angkatan Darat Tahun 2022	
4.	- Niko Wijaya, A.Md, Pengatur NIP 199310102022031006 - Berliana Cahyani, A.Md.A.B., Pengatur NIP199706132022032020	Pembelajaran Latsar CPNS secara Blended Learning Kerjasama dengan BPSDMD Prov. Sumsel Gol. II Angkatan VIII dan IX Tahun 2022	- Balitbang Diklat Kumdil MARI - Kapusdiklat Menpim Balitbang
5.	- Niarti, S.H, M.H., Kolonel Sus NRP 522941 - Dwi Yudo Utomo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 607952	Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer Seluruh Indonesia	- Balitbang Diklat Kumdil MARI - Dirjen Badilmiltun MARI
<b>NOVEMBER 2022</b>			
1.	- Supriyadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950303390275 - Muhammad Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004	Update Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Biro Kelengkapan MARI
2.	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 607952	Musyawarah Nasional IKAHI-XX Tahun 2022	- IKAHI - IKAHI Sumsel
3.	Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941	Rapat Kerja Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan dibawahnya	Dirjen Badilmiltun MARI
4.	Alexander S. Sihotang, S.E., Penata Muda NIP 199209072020121004	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Program dan Anggaran	Dilmilti I Medan
5.	Niarti, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522941	Pembinaan dan Pengarahan di Lingkungan Peradilan Militer	Dilmiltama
6.	Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681	Kegiatan Standarisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2022	Dirjen Badilmiltun MARI

**DESEMBER 2022**

1.	- Muhammad Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004 - Sorna Nauli Nasution, S.H., Penata Muda NIP 198606032011012023	Uji Kompetensi Dalam Rangka Perpindahan dari Jabatan Lain kedalam JF APK APBN dan JF PK APBN	Kemenkeu RI
2.	- Agustina Yanti, S.H. Penata Tk I NIP 196708151989032002 - Muhammad Nasir, S.H. Penata NIP 198205132006041004	Kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariatan tentang Pengelolaan BMN di Jajaran Pengadilan Militer	Dilmiltama
3	Niarti, S.H.,M.H., Kolonel Sus NRP 522941	Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan oleh Kadilmiltama di Lingkungan Peradilan Militer	Dilmiltama
10	Febriansyah, S.H., Penata NIP 198002232006041001	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa dan Teknologi Informasi	Sekretaris MARI



# Pengadilan Militer I-04 Palembang



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



## KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil 04/ 72.a /OT.01/KEP/I/2023

## TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 September 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

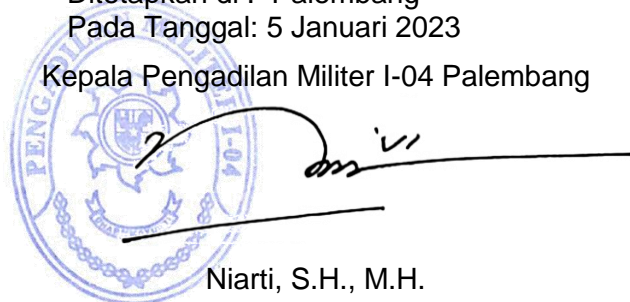
**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal: 5 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



The image shows the official seal of the Military Court I-04 Palembang, which is circular and contains the text 'PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Niarti, S.H., M.H.'. Below the signature is a horizontal line.

Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941


**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan <i>Stakeholder</i></div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> <li><i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Papera : Perwira Penyerah Perkara.</li> <li>Odmil : Oditur Militer.</li> <li>PM : Polisi Militer.</li> <li>Ankum : Atasan yang berhak menghukum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>• Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palembang, 5 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



**SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**Nomor : W1-Mil04/KEP/ 72 /OT.00/I/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

**KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agun;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Preside No 29 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

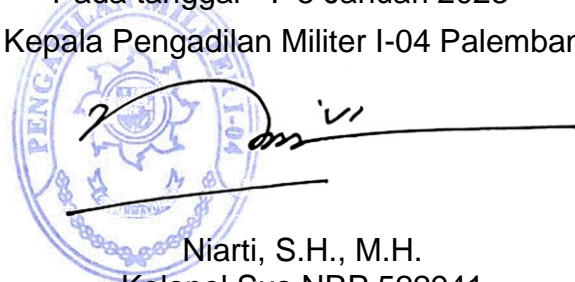
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Pengadilan Militer I Palembang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
  2. Kadilmiltama
  3. Kadilmilti I Medan
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
NOMOR : W1-Mil04/KEP/ 72 /OT.00/I/2023  
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

---

TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Sus Niarti, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Koordinator	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Sekretaris	ASN Febriansyah, S.H.
6	Anggota	1. Serma (K) Rosita, S.H. 2. CPNS Berliana Cahyani, A.Md. 3. PPNPN Sugeng Riyadi, S.E. 4. PPNPN Angga Wijaya, S.H.
7	Sekretariat	ASN Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E.

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

### NOTULEN RAPAT PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN DOKUMEN LAPORAN SAKIP TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

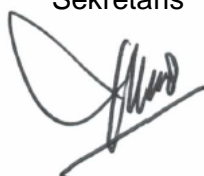
Tempat : Ruang Kadilmil I-04 Palembang  
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai  
Peserta : Terlampir dalam Absen

No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tanggapan	Solusi/ Keterangan
1.	Kadilmil	Pembukaan	<p>Kadilmil mengucapkan salam kepada peserta rapat, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada acara rapat. Kadilmil menyampaikan rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2877/SEK/OT.01.1/ 12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal penyampaian dokumen SAKIP pelaporan tahun 2022.</p> <p>Kadilmil memberikan kesempatan kepada Panitera untuk menyampaikan informasi dan materi dalam penyusunan Reviu IKU tahun 2022 yang akan dipakai sebagai indikator kinerja tahun depan.</p>	
2.	Panitera	Penyampaian Materi	<p>Panitera menyampaikan bahwa penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>Dengan demikian Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semula terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, berdasarkan Keputusan Sekma tersebut di atas menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja untuk Pengadilan Militer Tingkat Pertama.</p>	

3.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Panitera menyampaikan rapat ini agar IKU yang terbaru dapat diketahui oleh setiap pemangku jabatan yang terlibat mengingat perubahan ini pula berhubungan dengan Perjanjian kinerja yang akan dibuat pada awal tahun besok.</p> <p>Panitera mengingatkan agar penyusunan tim sesuai dengan tupoksi yang ada serta yang terlibat didalamnya agar dapat saling membantu. Seperti Kasubbag PTIP yang akan menggunakannya dalam membuat laporan kinerja tahunan dan kasubbag Kepegawaian dan Ortala untuk menyiapkan SK tim reuiu IKU.</p>	
4.	Kadilmil	Himbauan	<p>Informasi yang telah didapatkan dari Panitera untuk menjadi dasar dalam penyusunan IKU terbaru yang akan digunakan pada PKT tahun 2023, penyusunan Reuiu Matrik Renstra 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024, Rencana Aksi Kinerja tahun 2023, dan Laporan Kinerja tahun 2022.</p>	
6.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Isi dari indikator Kinerja Utama tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</li> <li>2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>4. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan</li> <li>5. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.</li> <li>6. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.</li> </ol>	
7.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Panitera menyarankan sebaiknya pada hari ini langsung menetapkan Reuiu IKU, menetapkan persentase target kinerja pada Matrik Renstra 2020 - 2024, persentase target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang diperlukan.</p>	
8.	Kadilmil	Himbauan	<p>Kadilmil I-04 Palembang menghimbau untuk selalu semangat dan bekerjasama untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra dalam lima tahun ke depan.</p> <p>Kadilmil mengingatkan agar dalam proses penyusunan diperhatikan pada pedoman penyusunan laporan sesuai dengan peraturan/ surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.</p>	

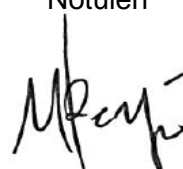
			Hasil rapat pembahasan penetapan IKU, Reviu Renstra 2020-2024, Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2023, RKT Tahun 2024 dan menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 akan ditetapkan per tanggal hari ini dan konsep laporannya dapat dibuat dan SK yang berhubungan dengan setiap produk silahkan dibuat.	
9.	Kadilmil	Penutup	Kadilmil menyampaikan rasa terima kasih kepada peserta rapat atas peran serta dan partisipasinya "Bersama Kita Bisa"	

Sekretaris



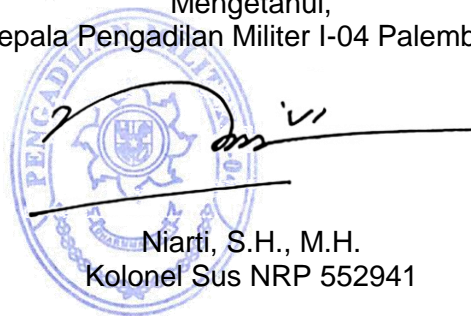
Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275

Palembang, 19 Desember 2022  
Notulen



Mona Anggreyni, S.I.P.  
NIP 199405162019032009

Mengetahui,  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 552941



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) -5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

Nomor : W1 Mil 04/UND/ 05 /XII/2022

Palembang, 16 Desember 2022

Perihal : Undangan Rapat

Yth. Kepada  
Kadilmil  
Pokkimmil  
Panitera  
Panmud Pidana  
Panmud Hukum  
Para Kasubbag  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Kadilmilti I Medan Nomor : W1-Mil/744/KU.00.1/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam acara rapat Penetapan Reviu IKU dan Dokumen SAKIP Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kadilmil I-04 Palembang

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04  
Waka  
U.b  
Sekretaris

  
Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275

DOKUMENTASI  
RAPAT PENETAPAN REVIU IKU DAN DOKUMEN LAPORAN SAKIP TAHUN 2022  
DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG





## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) -5620579

Email : [palembang@dimil.org](mailto:palembang@dimil.org)

Website : [www.dimil.palembang.go.id](http://www.dimil.palembang.go.id)

### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin/19 Desember 2022  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kadilmil I-04 Palembang  
Agenda : Penetapan Reviu IKU dan Dokumen SAKIP Tahun 2022

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Niarti, S.H., M.H. Kolonel Sus/522941	Kadilmil	
2.	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk/607952	Pokkimmil	
3.	Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (KY)11970027910670	Pokkimmil	
4.	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk/2920066651169	Pokkimmil	
5.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk/21990050480178	Panitera	
6.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk/21950303390275	Sekretaris	
7.	Tobri Antony, S.H. Lettu Chk/21000015161077	Panmud Hukum	
8.	Gunadi, S.H. Lettu Chk/21010051510681	Panmud Pidana	
9.	Sapriyanto, S.H. Peltu/21960346880974	Panitera Pengganti	
10.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk.I/196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
11.	Febriansyah, S.H. Penata/198002232006041001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
12.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata/198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
13.	Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda/199209072020121004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
BAGIAN KEPANITERAAN										
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	97%	97%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					89%	90%	93%	93%	94%	
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					89%	90%	93%	93%	94%	
Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan					89%	90%	91%	92%	92%	

2.	Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Minutasi yang tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya akses pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
BAGIAN KESEKRETARIATAN										
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	100%	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98%	98%	98%	98%	98%
					Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	50%	50%	50%	50%	50%
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98%	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50%	50%	50%	50%	50%

					Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%	90%	90%	90%	90%
					Persentase terlaksananya keprotokolannya	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98%	Meningkatnya penyusunan laporan secara tepat waktu	Persentase penyusunan laporan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%



# **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niarti, S.H.,M.H.  
Pangkat/Korp/NRP : Letkol Sus / 522941  
Jabatan : Kadilmil I-04 Palembang  
Kesatuan : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Parman Nainggolan, S.H.,M.H.  
Pangkat/Korp/NRP : Brigadir Jenderal TNI  
Jabatan : Kadilmilti I Medan  
Kesatuan : Pengadilan Militer Tinggi-I Medan

Selaku atasan **Pihak Kedua**

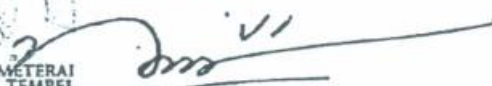
**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 3 Januari 2022

  
Pihak Kedua  
Parman Nainggolan, S.H.,M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

  
Pihak Pertama  
Niarti, S.H.,M.H.  
Letkol Sus NRP 522941



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**Unit Kerja : Pengadilan Militer I-04 Palembang**

Sasaran Program	Indikator	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	96 %
	b. Persentase Perkara 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %
	c. Persentase Penurunan sisa Perkara	40 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	93 %
	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Kegiatan :

	<u>Anggaran</u>
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 4.569.316.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 175.700.000,-
	<u>Rp. 4.755.016.500,-</u>

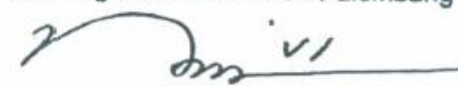
Kepala Pengadilan Militer I Medan



**Parman Nainggolan, S.H.,M.H.**  
Brigadir Jenderal TNI

Palembang, 3 Januari 2022

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



**Niarti, S.H.,M.H.**  
Letkol Sus NRP. 522941



# Pengadilan Militer I-04 Palembang



**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2023**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niarti, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	97 % 96 % 96 % 91 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 4.462.834.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp. 379.030.000,-
3. Meningkatkan Manajeman Peradilan Militer	Rp. 171.680.000,-
	<u>Rp. 5.013.544.000,-</u>


Palembang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,  
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
Nomor : W1-Mil04/ 32 /KP.01/KEP/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal: 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941

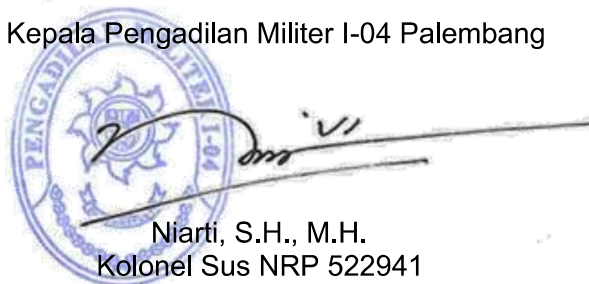
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
Nomor : W1-Mil04/ /KP.01/KEP/I/2023  
Tanggal : Januari 2023

---

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kolonel Sus Niarti, S.H., M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
3	Ketua	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Sekretaris	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Staf Subbag Umum Keuangan 2. Staf Subbag Kepegawaian 3. Staf Subbag PTIP 4. Staf Subbag Kepaniteraan
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	SK Hakim Pengawas Bidang

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
Nomor : W1-Mil04/ /KP.01/KEP/I/2023  
Tanggal : Januari 2023

---

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-04 Palembang
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Niarti, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522941



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H.A Bastari Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax: (0711) 5620579

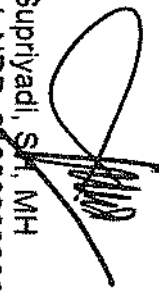
Website : dilimil.palembang.go.id

Email : palembang@dilimil.org

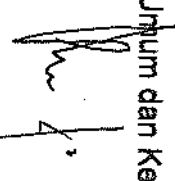
### REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No	Akun	Anggaran	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	2.720.162.000	2.715.240.972	99,82	4.921.028	0,18
2	Belanja Barang	1.508.746.000	1.482.221.000	98,24	26.525.000	1,76
3	Belanja Modal	210.445.000	193.370.000	91,89	17.075.000	8,11
	Jumlah	4.439.353.000	4.390.831.972	98,91	48.521.028	1,09

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Supriyadi, S.H., MH  
Mayor Chk NRP. 21950303390275

Palembang, 2 Januari 2023  
Kasubbag Umum dan Keuangan

  
Agustina Yanti, SH  
NIP. 196708151989032002



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H.A Bastari Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang  
Telp/fax (0711) 5620579  
Website : dlmlml.palembang.go.id  
Email : palembang@dlml.org

### REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No	Akun	Anggaran	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	175.700.000	159.103.400	90,55	16.596.600	9,45
	Jumlah	175.700.000	159.103.400	90,55	16.596.600	9,45

Palembang, 2 Januari 2023

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, SH, MH  
Mayor Chk NRP. 21950303390275

Kasubbag Umum dan Keuangan

Agustina Yanti, SH  
NIP. 196708151989032002



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) -5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

Nomor : W1 Mil 04/UND/ 02 /I/2023

Palembang, 17 Januari 2023

Perihal : Undangan Rapat

Yth. Kepada  
Kadilmil  
Pokkimmil  
Panitera  
Panmud Pidana  
Panmud Hukum  
Para Kasubbag  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Kadilmilti I Medan Nomor : W1-Mil/744/KU.00.1/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam acara rapat pembahasan Reviu Renstra 2020-2024 dan Penyusunan LKjIP Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kadilmil I-04 Palembang

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04  
Waka  
U.b  
Sekretaris

  
Supriyadi, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 21950303390275

**DOKUMENTASI  
RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA 2020-2024 DAN LKJIP TAHUN 2022  
DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

---





## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax: (0711) -5620579

Email: [palembang@ditmil.org](mailto:palembang@ditmil.org)

Website: [www.ditmil.palembang.go.id](http://www.ditmil.palembang.go.id)

### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu/18 Januari 2023  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kadimil I-04 Palembang  
Agenda : Rapat Penyusunan Renstra 2020-2024 dan LKJIP Tahun 2022

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Niarti, S.H., M.H. Kolonel Sus/522941	Kadimil	
2.	Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk/607952	Pokkimmil	
3.	Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K)/11970027910670	Pokkimmil	
4.	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk/2920066651169	Pokkimmil	
5.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk/21990050480178	Panitera	
6.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk/21950303390275	Sekretaris	
7.	Tobri Antony, S.H. Lettu Chk/21000015161077	Panmud Hukum	
8.	Gunadi, S.H. Lettu Chk/21010051510681	Panmud Pidana	
9.	Sapriyanto, S.H. Peltu/21960346880974	Panitera Pengganti	
10.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk.I/196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
11.	Febriansyah, S.H. Penata/198002232006041001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
12.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata/198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
13.	Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda/199209072020121004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
14.	Mona Anggreyni, S.E. Penata Muda/199405162019032009	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	
15.	Niko Wijaya, A.Md. Pengatur/199310102022031006	Pengelola Perkara	



## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)

Website : [www.dilmil.palembang.go.id](http://www.dilmil.palembang.go.id)

### CHEKLIST REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	PERNYATAAN		CHEKLIST
I	Format	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah</li><li>2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.</li><li>3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi Pemerintah yang memadai.</li><li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.</li><li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.</li><li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.</li></ol>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LKjIP di susun oleh unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi.</li><li>2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah di dukung dengan data yang memadai.</li><li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.</li><li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.</li><li>5. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya.</li><li>6. Analisis atau penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerjaterkait</li></ol>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam perjanjian kinerja.</li><li>2. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis.</li><li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.</li><li>4. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam perjanjian kinerja.</li><li>5. IKU pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.</li><li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.</li><li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, target jangka menengah, standar nasional, penyebab keberhasilan/ kegagalan, efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dan sebagainya yang bermanfaat.</li></ol>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

		8. IKU dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan dan sasaran. 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai. 10. IKU dan indikator kinerja telah SMART	√  √
--	--	---	------------

DOKUMENTASI PENGANUGERAHAN  
PERINGKAT II PENGADILAN TERBAIK KETERBUKAAN INFORMASI  
KATEGORI PENGADILAN MILITER TIPE A

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi  
Kategori Pengadilan Militer Tipe A

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Militer I 5 Pontianak	89,66
2	Pengadilan Militer I 4 Palembang	88,75
3	Pengadilan Militer I 7 Balikpapan	87,87
4	Pengadilan Militer III 16 Makassar	82,07
5	Pengadilan Militer I 2 Medan	82,02
6	Pengadilan Militer III 18 Ambon	81,90
7	Pengadilan Militer II 9 Bandung	81,90
8	Pengadilan Militer III 12 Surabaya	80,71
9	Pengadilan Militer I 1 Banda Aceh	80,46
10	Pengadilan Militer III 14 Denpasar	80,33

19/08/2022 14:44





# DOKUMENTASI KUNJUNGAN MAHASISWA UIN



DOKUMENTASI BANTUAN INFORMASI KEPADA MAHASISWA UNSRI DAN STIHPADA YANG AKAN MENGIKUTI LOMBA PERADILAN SEMU



